

BAB 3

SEJARAH SENTRALISME DEMOKRATIK DI RUSIA

3.1. Masa Lenin.

Konsep tentang sentralisme demokratik sebagai prinsip dalam organisasi partai di Rusia pertama kali dikemukakan pada tahun 1905 dalam resolusi organisasi PBSDR (Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia)¹⁹ yang merupakan gabungan antara Menshevik dan Bolshevik. Namun pelaksanaannya baru dilakukan setelah Bolshevik berhasil mempertahankan kekuasaannya selama masa Revolusi Bolshevik 1917 dan Perang Saudara. Kemudian Lenin mengumumkan prinsip “sentralisme demokratik” sebagai dasar kepemimpinannya. Sistem ini merupakan hasil dari ketidakpercayaan Lenin terhadap demokrasi ala Barat yang menjadi cita-cita kaum borjuis. Anggapan bahwa pemilihan umum mampu mengungkapkan kehendak mayoritas bagi Lenin merupakan ilusi khas borjuisme rendahan.²⁰

*“The pretty-bourgeois democrats, such as our Socialist-Revolutionaries and Mensheviks, and also their twin brothers, the social-chauvinists and opportunists of Western Europe, all expect ‘more’ from universal suffrage. They themselves share and instill into the minds of people the wrong idea that universal suffrage ‘in the modern state’ is really capable of expressing the will of the majority of the toilers and of ensuring its realization”.*²¹

Lebih jauh lagi demokrasi ala barat bagi Lenin hanyalah tipuan yang dipakai oleh kaum borjuis untuk merusak semangat revolusioner proletariat dan hanya sebuah alat untuk menyelamatkan kapitalisme. Tentang demokrasi parlementer Lenin menulis:

*“To decide once every few years which member of the ruling class in to misrepresents the people in parliaments is the real essence of bourgeois parliamentarism, not only in parliamentary-constitutional monarchies, but also in the most democratic republic”.*²²

¹⁹Dalam bahasa Rusia РСДРП: *Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия* (RSDRP: *Rossiiskaja Sotsial-Demokraticeskaja Rabochaja Partija*).

²⁰Lenin, *State and Revolution* (Moscow, 1966), hlm. 279.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, hlm. 304.

Bagi Lenin perjuangan partai harus dibangun dari atas ke bawah. Pandangan bahwa partai harus dibangun dari bawah adalah demokrasi yang keliru.²³ Negara harus disusun secara sentralistik, pimpinan pusat memiliki wewenang mutlak dan unsur-unsur bawah mutlak harus taat kepada unsur-unsur atas. Berulang kali Lenin menegaskan bahwa apabila berada dalam situasi gawat pemerintahannya harus berpola sentralisme mutlak.²⁴ Dalam keadaan lebih biasa prinsip dasar pemerintahan adalah sentralisme demokratik.²⁵ Dengan demikian sentralisme demokratik menjadi semacam doktrin resmi selama masa Uni Soviet.

Sentralisme demokratik adalah nama yang diberikan untuk prinsip pengorganisasian partai politik Lenin, dan kadang digunakan sebagai sinonim dari kebijakan Lenin dalam partai. Aspek demokratik dari prinsip ini adalah kebebasan anggota partai untuk mendiskusikan dan memperdebatkan kebijakan dan arah (tujuan) partai, namun keputusan partai dibuat oleh suara mayoritas, semua anggota diwajibkan untuk menjalankan keputusan tersebut, aspek inilah yang disebut sentralisme. Seperti apa yang dijelaskan oleh Lenin bahwa sentralisme demokratik terdiri atas “kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi”.²⁶

Tentang kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi tersebut, kongres menyimpulkan bahwa²⁷:

1. Dalam pertemuan-pertemuan partai, setiap orang harus diberi kebebasan sepenuhnya untuk mengeluarkan pendapat dan membela pendapat tersebut.
2. Dalam rapat-rapat umum politik, anggota partai tidak diperbolehkan melakukan agitasi yang bertentangan dengan keputusan kongres.

²³Franz Magnis-Suseno, *Dalam Bayang-bayang Lenin. Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka* (Jakarta, 2003), hlm. 16.

²⁴Pada tahun 1918, dalam suasana perang saudara pasca Revolusi Oktober, Lenin menulis “Partai berada dalam posisi sentralisme paling keras dan tata-tertib paling keras merupakan keharusan mutlak. Semua kepentingan dari tingkat lebih atas mempunyai daya ikat mutlak bagi yang lebih bawah. Setiap keputusan harus terlebih dahulu dilaksanakan dan baru sesudah itu orang boleh balik banding ke organ partai yang bersangkutan”. (F. Kazemzadel, *Kernig II*, pp. 337)

²⁵Hal itu terdapat dalam keputusan PBSDR yang disahkan pada tahun 1906 yang menyatakan bahwa “semua organisasi partai berdasarkan prinsip sentralisme demokratik”.

²⁶Lenin, *Report of the Unity Congress R.S.D.L.P.* 1906. <http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/ucong/index.htm>

²⁷Lenin, *Lenin Collected Works: The Congress Summed Up* (1965), Volume 10, p. 376. VIII. <http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/may/07.htm>

3. Dalam rapat partai tidak diperbolehkan seorangpun anggota partai menyerukan tindakan ataupun mengajukan resolusi yang bertentangan dengan keputusan kongres.

Sedangkan yang dimaksud dengan ciri yang berwatak Leninis dari sentralisme demokratik adalah meliputi prinsip organisasional yang sama sekali baru dalam sejarah gerakan sosialis, setidaknya sejak berkembangnya gerakan tersebut di Eropa pada dekade 1890-an. Prinsip organisasional yang baru tersebut adalah larangan bagi faksi minoritas di kalangan Bolshevik untuk "mengeluarkan pernyataan di muka umum hal-hal yang bisa mengganggu aksi-aksi atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh mayoritas." Sebagai alternatifnya, Lenin yang pada tahun 1914 mengirim laporan kepada forum pertemuan kaum sosialis Rusia yang diorganisir oleh Biro Internasional dari internasional kedua di Brussel, mengusulkan:

"kaum minoritas berhak mendiskusikan didalam forum partai, semua ketidaksepakatan tentang program, taktik dan organisasi yang dituangkan dalam jurnal yang khusus memuat perdebatan-perdebatan mengenai hal-hal diatas."²⁸

Gagasan lainnya yang juga ditafsirkan sebagai ciri khas Leninisme dalam membahas persoalan-persoalan organisasi partai sosialis adalah mengenai syarat-syarat keanggotaan partai. Dalam laporan yang dibuat oleh Lenin diatas, jika menunjuk sejumlah kebijaksanaan yang "tidak bisa diberi tempat dalam jajaran organisasi PBSDR ilegal." Kebijakan-kebijakan yang tak bisa diterima tersebut adalah penentangan terhadap keberadaan organisasi partai bawah tanah, usulan untuk mendukung pendirian partai buruh legal di Rusia karena hal itu akan tergiring menjadi "partai buruh yang dimanipulir oleh kekuasaan monarkis Tsar" penentangan terhadap slogan republik demokratik dan perampasan tanah-tanah perkebunan dan pandangan tentang bangsa-bangsa tertindas yang menyimpang dari keputusan kongres PBSDR tahun 1903.

Kunci dari pengorganisasian sentralisme demokratik sebagai berikut²⁹:

1. Pemilihan badan-badan dalam partai mulai dari bawah sampai atas dan pembaharuan yang sistematis jika memang diperlukan.

²⁸Lorimer, *Op. Cit.*

²⁹Lihat Lenin, *On Party Unity: Resolution of 10th Congress.*
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/691998/democratic-centralism>

2. Tanggung jawab baik dari badan yang lebih rendah maupun badan yang lebih tinggi terhadap partai.
3. Disiplin tinggi terhadap partai, dimana badan yang lebih rendah harus tunduk kepada badan yang lebih tinggi hingga suatu kebijakan yang diambil telah berubah.
4. Keputusan dari badan yang lebih tinggi merupakan mandat untuk badan yang lebih rendah.
5. Adanya kerja sama semua anggota partai, komunikasi antar anggota dan tanggung jawab semua anggota partai demi kelangsungan partai.

Jadi sentralisme demokratik berarti dalam partai, para utusan dan pemimpin partai dipilih secara demokratis oleh anggota-anggota partai. Sesudah itu tetap berlaku sentralisme, artinya anggota partai harus taat pada keputusan Komite Sentral yang memiliki wewenang mutlak untuk menentukan kebijakan, strategi dan taktik perjuangan partai.³⁰ Partai menilai bahwa demokrasi yang berlebihan akan menyebabkan disorganisasi dan kebingungan, begitu pula sentralisme yang berlebihan akan mengarah pada birokratisme, adanya keputusan sepihak dan hilangnya komitmen antar anggota partai. Dengan demikian demokrasi dan sentralisme harus berjalan secara seimbang.

Penerapan sentralisme demokratik ini tidak hanya dalam kepemimpinan partai atau politik saja namun juga dalam bidang ekonomi. Sebelum adanya NEP (New Economic Policy) program-program yang diusung Bolshevik menunjukkan adanya sentralisasi. Berikut program-program Pembangunan Ekonomi Bolshevik pada masa itu.³¹

1. Nasionalisasi perbankan, penggabungan ke dalam bank tunggal pemerintah.
2. Nasionalisasi *trust, syndicate* yang menguasai industri-industri besar.
3. Pembentukan kontrol pekerja atas produksi dan pembagian kerja sebagai langkah persiapan nasionalisasi seluruh industri dan perdagangan.
4. Pembentukan monopoli pemerintah atas perdagangan luar negeri.

³⁰Magnis-Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 18.

³¹Fahrudji, *Op. Cit.*, hlm. 131.

5. Penyitaan tanah-tanah milik tuan tanah, nasionalisasi seluruh tanah, serta pembentukan *Sovkhos* (Perekonomian Soviet) dari perkebunan-perkebunan sitaan milik tuan-tuan tanah yang berskala besar.
6. Mengejar ketertinggalan ekonomi negara dengan cara memacu perkembangan kekuatan produksi.

3.2. Masa Stalin.

Gagasan untuk meruntuhkan sistem sentralisme demokratik sudah tercetus sejak tahun-tahun terakhir pemerintahan Lenin. Gagasan "otonomi" pertama diusulkan oleh Stalin dan teman-temannya lewat komisi-komisi yang ada dalam Komite Sentral, mereka berpendapat bahwa hal itu akan memancing lebih banyak republik untuk bergabung. Dalam Sidang I Seluruh Soviet pada tanggal 30 Desember 1922, Stalin masih mencoba memasukkan gagasannya, yakni pemberian otonomi pada republik-republik. Lenin, yang tak hadir karena sakit, hanya mengirimkan surat, agar republik-republik dalam Uni Soviet menandatangani persamaan hak dan membentuk uni dengan pemerintahan sentralisasi.³² Menjelang meninggal, Lenin menyesal. Sistem yang diusulkannya membuat pemerintah pusat begitu berkuasa. Ia menulis surat, agar dalam kongres berikutnya sistem itu diubah, dengan memberikan otonomi pada republik-republik, dan hanya politik luar negeri dan militer yang dipegang pusat. Sejarah mencatat, pesan Lenin terakhir ini tak dilaksanakan. Stalin yang semula mengusulkan otonomi itu, justru makin mengukuhkan sistem sentralisasi di negara tersebut setelah dia naik sebagai pemimpin Uni Soviet menggantikan Lenin.

Pada masa Stalin, sentralisme demokratik dipengaruhi oleh Stalinisme. Stalinisme adalah suatu ideologi politik yang dipakai di Uni Soviet saat berada di bawah kepemimpinan Joseph Stalin (tahun 1929-1953). Saat politik ini berlangsung, praktek spionase dan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik banyak terjadi. Selain itu negara menjadi seperti tanpa pengadilan karena Stalin menggunakan supremasi individualnya untuk mengontrol negara melalui

³²Lihat Roy Medvedev, *Let History Judge* (Oxford, 1989).

partainya yaitu Partai Komunis. Stalinisme juga merupakan alat propaganda Stalin untuk membangun kultus individual agar menjadi ditaktor mutlak.

Saat stalinisme berlangsung, sentralisme demokratik lebih sering disebut dengan “sentralisme birokrasi”. Dalam sentralisme birokrasi, kebijakan negara ditentukan secara mutlak oleh Pemimpin Tertinggi yaitu Stalin sendiri sedangkan semua orang di hirarki bawahnya tidak memiliki wewenang. Ini berarti anggota lainnya tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan karena Pemimpin Tertinggi adalah subjek yang dapat menekan anggota lainnya. Sistem birokrasi Stalin menempatkan seluruh elemen negara di bawah kekuasaannya. Mulai dari kepemimpinan Partai Komunis, Komite Sentral PKUS, Dewan Komisariat Rakyat (Dewan Menteri), Komite Keamanan Negara (GKO), selain itu ia juga menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.³³ Prinsip inilah yang dijadikan dasar selama masa pemerintahan Stalin.

Pengorganisasiannya menggunakan prinsip ultrakonformis dari atas ke bawah, kekuatan militer, paksaan, siksaan bahkan pembunuhan. Salah satu aspek Teror Besar pada masa Stalin adalah “Kultus Stalin” yaitu pendewaan terhadap sosok Stalin: ia adalah maha kuasa, maha ada, maha mengetahui, tidak pernah salah.³⁴ Ia menyingkirkan lawan-lawan politik bahkan kawan-kawannya seperti Trotsky, Zinoviev dan Kamenev. Selama tahun 1937 dan 1938 ketika Teror Besar sedang dalam masa puncaknya, petugas keamanan telah menahan 1.548.366 aktivis yang dicurigai anti-Soviet, dari jumlah tersebut 681.692 diantaranya ditembak, sehari rata-rata terjadi 1.000 eksekusi. Sebagian besar yang selamat berakhir di kamp-kamp kerja paksa.³⁵ Teror ini baru berakhir setelah kematiannya pada tahun 1953.

3.3. Masa Nikita Khrushchev.

Nikita Khrushchev menjadi pemimpin Uni Soviet menggantikan Stalin yang meninggal pada tahun 1953. Khrushchev kemudian mengumumkan kebijakannya yaitu destalinisasi. Destalinisasi adalah kebijakan Khrushchev untuk menghapuskan seluruh pengaruh Stalin dalam negara baik dalam bidang politik

³³Fahrudodji, *Op. Cit.*, hlm.143.

³⁴Richard Pipes, *Komunisme Sebuah Sejarah*. (terj.). Dono Sunardi (Yogyakarta, 2004), hlm. 102.

³⁵R.G. Pikhoia, *Sovetskii Soiuz: Istoriia Vlasti, 1945-1991* (Moskow, 1998), p.140.

maupun sosial masyarakat Uni Soviet. Pada periode destalinisasi atau pada masa pemerintahan Khrushchev (1959-1964) Uni Soviet membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengkritik kebijakan politik yang represif yang pernah dilakukan Stalin.³⁶

Destalinisasi yang dijalankan Khrushchev bertujuan untuk menghapus sistem sentralisme-birokrasi. Untuk itu Khrushchev memerintahkan diberhentikannya pengkultusan atas Stalin, merehabilitasi korban-korban Stalin dan menghapuskan sistem Gulag³⁷. Akibat dari destalinisasi ini adalah dipindahkannya makam Stalin dari musoleum³⁸, Stalingrad diubah namanya menjadi Volgograd, gambar-gambar, patung-patung dan nama-nama tempat yang menggunakan nama Stalin disingkirkan.³⁹ Selain destalinisasi, kebijakan lain yang juga dilaksanakan Khrushchev adalah demokratisasi. Beberapa langkah demokratisasi yang dilakukan Khrushchev adalah dengan menghentikan Kasus Dokter⁴⁰ dan membebaskan tahanan politik yang terlibat dalam Kasus Mingrels⁴¹. Kedua kasus ini terjadi pada masa pemerintahan Stalin.

Ia mengubah institusi-institusi atau aturan hukum dasar, namun tetap menghidupkan aturan satu-partai, polisi negara dan badan penyensoran. Meskipun demikian kehidupan warga Uni Soviet dibawah pemerintahan Khrushchev jauh lebih mudah daripada pada masa Stalin. Kelonggaran yang mereka peroleh selama masa pemerintahan Khrushchev antara lain⁴²: Jutaan penghuni kamp konsentrasi mendapatkan kembali kebebasan mereka, korban-korban penindasan direhabilitasi, hubungan dengan asing mulai diperbolehkan lagi. Pada saat itu orang asing yang mendapat visa Uni Soviet menjadi lebih banyak begitu pula

³⁶Alkatiri, *Op. Cit.*, hlm. 54.

³⁷Gulag merupakan singkatan dari *Glavnoe Upravlenie Lagerei* (Direktorat Utama Kamp) yang merupakan rumah tahanan (kamp) dan rehabilitasi di seluruh Uni Soviet. Awalnya lembaga ini berfungsi untuk merehabilitasi para kriminal dan kaum revolusioner agar mereka menjadi orang-orang yang antusias pada pembangunan komunisme. Namun pada perkembangannya, kamp ini berubah menjadi kamp kerja paksa. Penghuninya makan dengan sistem ransum (jatah makanan), tidur di tempat sempit dan memiliki jam kerja yang berat. Mereka dipekerjakan untuk membangun jembatan, kanal-kanal besar, jalan raya dan jalur kereta api. (*Ibid.*, hlm.146).

³⁸Makam Lenin yang terdapat di Lapangan Merah (Red Square).

³⁹Pipes, *Op. Cit.*, hlm.114.

⁴⁰Kasus ini berawal dari tuduhan Stalin terhadap dokter istana yang diduga akan melakukan pembunuhan terhadap dirinya. (Fahrurodji, *Op. Cit.*, hlm. 151).

⁴¹Kasus ini mencuat ketika pemerintah pusat menuduhkan tindakan spionase yang dilakukan kelompok nasionalis Mingrel (Georgia) yang melibatkan pimpinan Partai Komunis setempat (*Ibid.*, hlm. 151).

⁴²Pipes, *Op. Cit.*, hlm.115.

dengan rakyat Uni Soviet yang bepergian ke luar negeri. Siaran-siaran asing pun diperbolehkan sehingga rakyat dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan dalam maupun luar negeri.

3.4. Masa Leonid Brezhnev.

Leonid Brezhnev menjadi pemimpin Uni Soviet menggantikan Khrushchev yang mengundurkan diri pada Oktober 1964. Naiknya Brezhnev menguatkan kembali kubu konservatif partai, yang berarti negara kembali seperti pada masa Stalin. Jika pada masa Khrushchev terjadi destalinisasi maka pada masa Brezhnev terjadi dekhrushevikasi. Dekhrushevikasi yang dilakukan Brezhnev bertujuan untuk menghapus kebijakan-kebijakan Khrushchev. Sistem kendali yang ditekankan pemerintah, kembali memperkuat sistem birokrasi Rusia.⁴³ Pada masa Brezhnev (1964-1982) gerakan pro demokrasi dan HAM dipersempit ruang gerakannya.⁴⁴

Pada masa pemerintahan Brezhnev sentralisme demokratik kembali ditegaskan dalam Konstitusi Soviet tahun 1977 sebagai prinsip yang mengatur negara: “Negara Soviet diatur dan dijalankan berdasarkan prinsip sentralisme demokratik, yaitu kendali kekuasaan negara dari yang tertinggi ke yang terendah, tanggung jawab terhadap rakyat dan kewajiban badan yang lebih rendah terhadap badan yang lebih tinggi. Sentralisme demokratik mengkombinasikan kepemimpinan pusat dan daerah untuk bekerja sama dan saling bertanggung jawab atas tugas masing-masing badan.”⁴⁵ Konstitusi Soviet 1977 lebih ditekankan pada kemerdekaan dari penindasan kaum borjuis. Artinya terdapat hak hidup pihak lain yang direbut dengan mengatasnamakan hak proletariat.⁴⁶ Konstitusi Soviet 1977 lebih menyediakan sarana kehidupan bagi masyarakatnya. Hak dasar kodrati tidak diperdulikan sebab hak tersebut diambil dan diatur oleh negara.⁴⁷

⁴³Fahrurudji, *Op. Cit.*, hlm. 169.

⁴⁴Alkatiri, *Op. Cit.*, hlm. 68.

⁴⁵Terdapat dalam *1977 Soviet Constitution, Part I Principles of Social Structure and Policy, Chapter 1 Political System, Article 3.*
<http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons01.html>.

⁴⁶Alkatiri, *Op. Cit.*, hlm. 52.

⁴⁷*Ibid.*

3.5. Masa Mikhail Gorbachev.

Setelah era Brezhnev, Uni Soviet pernah dipimpin oleh Yuri Andropov (1982-1984) dan Konstantin Chernenko (1984-1985). Setelah kematian Chernenko, Majelis Tinggi Uni Soviet pada tanggal 11 Maret 1985 mengangkat Mikhail Gorbachev sebagai Sekretaris Jenderal PKUS (Partai Komunis Uni Soviet).⁴⁸ Ia kemudian mengajukan reformasi atau akselerasi di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dikenal dengan nama Perestroika. Konsepsi tersebut dibahas pada bulan April 1985, pada sidang pleno yang kemudian disahkan menjadi garis pedoman tugas partai dalam Kongres XXVIII tahun 1987, sebagai dasar pembangunan masyarakat sosialis terpadu yang akan datang.⁴⁹

Mikhail Gorbachev membawa perubahan yang besar dalam sistem pemerintahan Uni Soviet. Pada tahun 1986, Gorbachev mencetuskan program restrukturisasi yang dikenal dengan nama *Perestroika* yang di dalamnya terkandung konsep *Glasnost* (keterbukaan) dan *Demokratiya* (demokrasi). Menurut Gorbachev tanpa kedua konsep tersebut maka *Perestroika* akan gagal. Pada perkembangannya, *Perestroika* kemudian menjadi simbol reformasi yang cenderung bersifat pembaharuan. *Perestroika* adalah sebuah restrukturisasi di segala bidang untuk mengantisipasi stagnasi dengan menciptakan mekanisme percepatan dalam konteks keterbukaan dan demokrasi.⁵⁰ Gorbachev juga mengurangi dominasi partai dengan membatasi masa jabatan ketua partai dan menghapus pasal 6 Konstitusi Soviet 1977 tentang kedudukan partai dalam pemerintahan Uni Soviet.⁵¹

Sebagai tindak lanjut dari programnya, maka pada Januari 1987, Gorbachev menyerukan diadakannya demokratisasi: memperkenalkan unsur-unsur demokratis seperti misalnya pemilu dengan banyak kandidat di dalam proses politik Uni Soviet. Pada Juni 1988, dalam Konferensi Partai ke-19 dari PKUS, Gorbachev meluncurkan pembaruan-pembaruan radikal yang dimaksudkan untuk mengurangi kontrol partai terhadap aparat-aparat pemerintahan. Pada Desember 1988, Dewan Tertinggi Soviet menyetujui

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 65.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 66.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 67

⁵¹*Ibid.*, hlm. 66.

dibentuknya suatu Kongres Deputi Rakyat yang sebelumnya telah ditetapkan oleh amandemen konstitusi sebagai dewan legislatif Uni Soviet yang baru. Pemilihan umum untuk anggota kongres diadakan di seluruh Uni Soviet pada Maret dan April 1989. Pada 15 Maret 1990 Gorbachev terpilih sebagai Presiden eksekutif pertama Uni Soviet.

Selain itu pada masa Gorbachev terbentuk berbagai organisasi masyarakat, seperti organisasi politik, profesional, sosial, termasuk lembaga HAM. Terbentuknya berbagai organisasi ini karena adanya undang-undang yang dikeluarkan Gorbachev tentang kebebasan membentuk organisasi, selain itu penyensoran terhadap media pers juga mulai dikurangi.⁵² Banyaknya perubahan yang terjadi karena adanya program *Glasnost* dan *Perestroika* menunjukkan bahwa sentralisme demokratik tergeser oleh demokrasi liberal ala barat.

3.6. Masa Boris Yeltsin.

Boris Yeltsin merupakan presiden Federasi Rusia yang pertama. Banyak perubahan yang terjadi di negara tersebut pasca runtuhnya Uni Soviet. Berdasarkan Konstitusi Federasi Rusia yang disahkan pada tanggal 12 Desember 1993, Rusia dideklarasikan sebagai⁵³: “negara hukum yang berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan presidensiil.” Konstitusi menekankan prinsip pemisahan kekuasaan Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif yang masing-masing berdiri sendiri. Kekuasaan pemerintah dalam lingkup negara dipegang oleh: Presiden, Dewan Federasi, Pemerintah (*Pravitel'stvo*) dan Kehakiman, sedangkan dalam lingkup Subjek Federasi Rusia (di republik-republik, daerah / *kray*, *oblast* dan *oblast otonom*) dipegang oleh organ-organ kekuasaan setempat. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip sentralisme demokratik yang terpusat.

Bila dilihat dari ciri demokrasi yaitu: adanya *checks and balances*, multi partai, pemilu, partisipasi dan masyarakat sipil maka apa yang dilakukan presiden Boris Yeltsin menunjukkan adanya demokrasi yang berbeda dari demokrasi dalam sentralisme demokratik.⁵⁴ Beberapa indikator demokrasi lain dapat dilihat dari adanya lembaga perwakilan rakyat yang terpilih, adanya agen demokrasi, seperti

⁵²*Ibid.*, hlm.72.

⁵³*Ibid.*, hlm.194.

⁵⁴*Ibid.* hlm.164.

media pers yang bebas dan bertanggung jawab, adanya ruang gerak yang diberikan pemerintah bagi masyarakat sipil, agensi seperti praktisi hukum, mahasiswa dan organisasi sosial dan yang mendasar yaitu perangkat hukum yang transparan, jujur dan adil.⁵⁵

3.7. Masa Vladimir Putin.

Setelah sempat menghilang, sentralisme demokratik kembali pada masa presiden Vladimir Putin. Tindakan-tindakan yang diambil oleh presiden Vladimir Putin sering kali menunjukkan bahwa ia sedang melakukan sentralisasi. Namun ia tidak meninggalkan demokrasi begitu saja. Unsur-unsur demokrasi seperti multi partai, Pemilu, organisasi sosial, media dan pers yang dirintis sejak masa Mikhail Gorbachev masih ada walaupun tidak sebebas dahulu dan dalam beberapa hal mulai dibatasi.

Vladimir Putin cenderung melakukan sentralisasi dengan mengurangi pemilihan langsung gubernur regional, meninjau ulang sistem distrik atau menciptakan parlemen yang makin sejalan dengan kekuasaan dan lebih membatasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM tak boleh menggunakan dana asing sebab dengan demikian maka LSM-LSM tersebut hanya akan menjalankan agenda asing yang dianggap presiden Vladimir Putin akan merusak kedaulatan negara. Presiden Vladimir Putin bahkan membatasi ruang gerak pers di Rusia. Hal ini membuatnya dijuluki sebagai Demokratator oleh kelompok pers CPJ (*The Committee To Protect Journalists*).⁵⁶

Demokratator merujuk pada diktator yang terpilih secara demokratis⁵⁷. Demokratator menggulingkan hukum di negeri yang memilihnya dan menjadi diktator seumur hidup. Istilah demokratator berasal dari Guillermo O'donnells, yaitu *democradura* yang ia artikan sebagai *hard democracy* (demokrasi keras).⁵⁸ Dapat juga dilihat sebagai kombinasi dari *democracy* (demokrasi) dan *dictator* (diktator). Namun inti dari istilah ini dapat dilihat dari proses pemilihan,

⁵⁵*Ibid.* hlm. 160.

⁵⁶“Press Group Calls Putin A ‘Democratator’, *Radio Free Europe/Radio Liberty*”, Feb 5, 2007 : www.rferl.org

⁵⁷“Chavez’s Push For Permanence, *Time*”, Aug 17, 2007. <http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1653937,00.html>

⁵⁸Greg Weeks, “Thoughts on democratators, *Two Week Notice*”, Dec 15, 2007. <http://weeksnotice.blogspot.com/2007/12/thoughts-on-democratators.html>

pemerintahan terpusat, kekuasaan tunggal dan pemerintahan yang menekan dan menindas kebebasan rakyatnya.⁵⁹

Oleh kalangan pers Barat, presiden Vladimir Putin dianggap mempertunjukkan model baru dari kontrol pemerintah terhadap pers dengan melegalkan pengontrolan, penyensoran dan intimidasi terhadap pers di negerinya. Menurut laporan, 13 jurnalis dibunuh di Rusia sejak Vladimir Putin berkuasa pada tahun 2000.⁶⁰ Kasus yang paling terkenal adalah terbunuhnya Anna Politkovskaya pada Oktober 2006. Anna Politkovskaya adalah seorang jurnalis senior harian *Novaya Gazeta* yang bertugas meliput situasi perang di Chechnya sejak tahun 1999. Ia terkenal sering mengkritik kebijakan Kremlin dan presiden Vladimir Putin dalam menangani masalah di Chechnya. Kritiknya tersebut terdapat dalam buku-buku hasil karyanya yaitu: *Putin's Russia: Life A Failing Democracy* dan *A Dirty War: A Russia Reporter in Chechnya*. Selain itu tulisannya di harian *Novaya Gazeta* sering berisi laporan pelanggaran HAM di Chechnya.⁶¹

Ia tewas tertembak di bagian kepala dan dada di lantai dasar apartemennya di *Leshnaya Ulitsa* pada 7 Oktober 2006, beberapa saat setelah keluar dari lift. Rekan-rekannya curiga bahwa kematiannya bermotifkan politik dan dilakukan pembunuh bayaran atas keinginan pemerintah.⁶² Hal ini diperkuat laporan bahwa pada 9 Oktober 2006, artikelnya tentang penyiksaan di Chechnya akan diterbitkan. Peristiwa terbunuhnya Anna Politkovskaya ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pers baik Rusia maupun dunia terhadap kelangsungan kebebasan pers di Rusia.

Namun pendapat dan kekhawatiran dari kelompok pers dan pihak barat soal kepemimpinan presiden Vladimir Putin tersebut bertentangan dengan pendapat Gorbachev. Dalam wawancaranya dengan *Radio Free Europe* Gorbachev menyatakan:

“Sebagai negara yang berada dalam masa transisi, tidak pelak lagi beberapa kebebasan berimbas dan kesalahan dilakukan. Tapi, saya yakin

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹www.conectique.com/get_update/article.php?article_id=4356.

⁶²Funeral for shot Russian reporter, BBC news, October 10, 2006. http://www.nowpublic.com/funeral_for_shot_russian_reporter_bbc_news.

bahwa presiden kita tidak berupaya mendirikan pemerintahan otoriter jenis apapun.”⁶³

“Ada banyak tuduhan bahwa demokrasi sedang ditindas dan kebebasan pers dibatasi. Sesungguhnya, kebanyakan rakyat Rusia tidak setuju dengan pandangan itu. Kami berada dalam masa bersejarah yang sulit. Transisi kami ke demokrasi bukan transisi yang mulus...Ketika Putin pertama kali berkuasa, saya kira prioritasnya adalah menjaga negara ini agar tidak terpecah-pecah, dan hal itu menuntut dilakukannya tindakan tertentu yang tidak persis sama dengan definisi demokrasi dalam buku pelajaran. Ya, memang ada beberapa kecenderungan antidemokrasi yang mengkhawatirkan...Tapi, saya kira kita tidak perlu mendramatisir situasi itu.”⁶⁴

Dari pernyataan Gorbachev diatas, terlihat adanya keyakinan bahwa presiden Vladimir Putin tidak sedang berusaha untuk membangun pemerintahan yang otoriter ataupun berusaha menghapus demokrasi di Rusia. Namun tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah demi keutuhan dan kestabilan negara. Karena Rusia bukan negara yang cocok dengan demokrasi liberal yang banyak digunakan di negara-negara barat. Rusia akan menjalankan demokrasi dalam negaranya tetapi tentunya dengan demokrasi ala Rusia yang cocok dengan kondisi negara dan masyarakat Rusia. Jadi pihak barat tidak perlu terlalu mencampuri pelaksanaan demokrasi di Rusia.

Tindakan lain presiden Vladimir Putin yang dianggap oleh pihak barat menunjukkan bahwa ia melakukan sentralisasi kekuasaan adalah saat ia menciutkan jumlah federal, mengurangi kekuasaan otonomi daerah dan mengganti sistem pemilihan gubernur. Calon gubernur diseleksi kantor kepresidenan, baru kemudian dipilih parlemen. Para pengamat barat mengatakan bahwa presiden Vladimir Putin menjalankan sistem *quasi-democracy* (separuh demokrasi) di Rusia. Namun ia membantahnya dan menyatakan bahwa demokrasi yang cocok diterapkan di Rusia adalah *Sovereignty Democracy* (demokrasi berdaulat)⁶⁵ bukan demokrasi liberal seperti di barat oleh sebab itu penerapannya pun berbeda.

⁶³Dikutip dari wawancara Gorbachev dengan Radio Free Europe pada tanggal 1 Maret 2006 (Greenspan, *Op. Cit.*)

⁶⁴Dikutip dari wawancara Gorbachev dengan Radio Free Europe pada tanggal 18 Agustus 2006 (*Ibid.*)

⁶⁵Richard Sakwa, *Putin: Russia's choice* (New York, 2008), hlm. 42.

Demokrasi di Rusia pada masa pemerintahan presiden Vladimir Putin adalah demokrasi menurut versinya, yaitu demokrasi yang dibatasi oleh sentralisme. Artinya kebebasan di negara itu diperbolehkan namun rakyat tetap harus tunduk pada pemerintah. Hal ini seperti prinsip sentralisme demokratik yaitu unsur-unsur bawah memiliki hak untuk berpartisipasi aktif namun tetap harus tunduk terhadap unsur-unsur di atasnya. Secara politik presiden Vladimir Putin berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan dengan mengubah haluan dari demokrasi liberal menjadi demokrasi ala Rusia yakni demokrasi yang sentralistik yang disebut dengan Prinsip Sentralisme Demokratik.

Melihat pelaksanaan dari sentralisme demokratik dari masa ke masa terlihat bahwa pelaksanaannya di tiap masa pemerintahan memiliki ciri yang berbeda bahkan sering menyimpang tergantung dari siapa yang sedang memimpin. Karena ideologi para pemimpin tersebut sangat berpengaruh terhadap penerapan sentralisme demokratik. Masa Lenin merupakan masa awal digunakannya sentralisme demokratik sebagai dasar pemerintahan negara. Selama berdirinya Uni Soviet, sistem ini merupakan dasar dari pengorganisasian partai komunis sebagai partai yang memegang kekuasaan untuk menjalankan negara. Sistem ini merupakan perwujudan ketidakpercayaan Lenin terhadap demokrasi ala barat yang oleh Lenin dianggap hanya akan mengembalikan kekuasaan kaum borjuis. Sistem ini diyakini dapat memperkokoh kesolidan dan kedisiplinan dalam tubuh partai komunis karena dalam sentralisme demokratik memungkinkan anggota partai untuk berdiskusi dan berperan aktif dalam partai sekaligus tetap mengutamakan kepentingan bersama.

Selama masa Lenin penggunaan sentralisme demokratik sebagai dasar pemerintahan memang belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi peningkatan taraf kehidupan rakyat Uni Soviet. Namun sistem ini mampu menyatukan anggota partai pasca perang saudara sehingga mencegah terjadinya perpecahan. Lebih jauh lagi sistem ini ternyata mampu menjadi doktrin resmi bagi penerus-penerus Lenin. Walaupun dalam perkembangannya sentralisme demokratik banyak mengalami percampuran dan dipengaruhi oleh pemikiran

pemimpinnya sehingga tak jarang pelaksanaannya menjadi menyimpang tetapi sistem ini tetap digunakan sebagai dasar pemerintahan.

Penyimpangan mulai terlihat pada masa pemerintahan Stalin. Adanya stalinisme menunjukkan bahwa pada masa Stalin terjadi penyimpangan dari sentralisme demokratik. Penyimpangan tersebut terwujud dalam bentuk sentralisme birokrasi. Sentralisme birokrasi memang tidak menghilangkan sentralisme demokratik tetapi sistem ini melemahkan demokrasi. Sentralisme demokratik yang seharusnya merupakan sentralisasi yang berdasarkan demokrasi menjadi demokrasi di bawah sentralisasi (dalam hal ini pemerintah pusat yaitu Stalin sendiri). Stalin mengabaikan hak minoritas dalam partai dengan tidak memberikan hak untuk mengkritik, memberi usulan atau mendiskusikan keputusan-keputusan dalam partai. Hal tersebut jelas bertentangan dengan “kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi” yang merupakan aspek utama dari sentralisme demokratik.

Jika pada masa Stalin terjadi penyimpangan maka apa yang dilakukan Khrushchev menunjukkan bahwa sentralisme demokratik mulai terancam oleh demokrasi ala barat. Pada masa pemerintahannya demokrasi liberal mulai masuk di Uni Soviet walaupun sentralisme demokratik masih berpengaruh. Pengaruh dari sentralisme demokratik terlihat dari aturan satu partai yang masih berlaku. Pada masa pemerintahannya Khrushchev tidak sempat menjalankan debirokratisasi walaupun berhasil menjalankan destalinisasi. Sehingga pada pertengahan 1960an, penggantinya Brezhnev kembali menguatkan dan menegaskan sistem sentralisme demokrasi.

Dengan menegaskan kembali sentralisme demokratik dalam Konstitusi Soviet 1977, Brezhnev kembali menjalankan pemerintahan seperti pada masa Lenin. Pada masa inilah pelaksanaan sentralisme demokratik yang sesuai dengan ide Lenin dijalankan. Setelah masa pemerintahan Brezhnev yaitu pada masa Gorbachev dan Yeltsin, sentralisme demokratik terpinggirkan oleh demokrasi liberal. Bahkan Konstitusi Soviet 1977 yang memuat tentang sentralisme demokratik sebagai dasar pemerintahan negara pun diamandemen beberapa kali oleh kedua pemimpin tersebut. Konstitusi Soviet 1977 merupakan konstitusi

terakhir Uni Soviet hingga runtuhnya negara tersebut dan berganti menjadi Federasi Rusia.

Sentralisme demokratik pada masa Gorbachev semakin terpinggirkan oleh demokrasi liberal. Tindakan Gorbachev yang mengubah sistem partai tunggal menjadi sistem multi partai jelas merupakan usaha untuk menuju demokrasi liberal yang salah satu cirinya adalah multi partai. Selain itu ia juga melakukan pembaharuan dengan mengadakan Pemilu Parlementer untuk memilih presiden. Sekali lagi tindakannya ini menunjukkan adanya usaha menjalankan demokrasi liberal dengan mengadakan pemilihan umum. Dalam menjalankan pemerintahannya Gorbachev masih berpegang pada Konstitusi Soviet 1977 walaupun ia mengamandemen beberapa pasal dalam konstitusi tersebut. Pasal 6 yang berisi tentang kedudukan partai dalam pemerintahan Uni Soviet dihapuskan.

Pada masa pemerintahan Yeltsin, sentralisme demokratik semakin menghilang. Dalam menjalankan pemerintahannya, Yeltsin mengadopsi sistem demokrasi liberal yang dirintis sejak masa Gorbachev. Masa periode pemerintahan Yeltsin merupakan masa transisi masyarakat dan negara Federasi Rusia menuju demokrasi.⁶⁶ Dalam masa transisi atau masa pemerintahan presiden Boris Yeltsin telah dilakukan serangkaian tahapan demokratisasi, seperti membuat konstitusi baru, mencabut undang-undang kadaluwarsa yang bertentangan dengan HAM, mengadakan pemilu parlementer dan presiden, mempertahankan kedaulatan wilayah politis, mengakomodasi dan mengkonsolidasi kelompok atau elite politik baik yang pro maupun yang anti demokrasi, dan membuka kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya serta juga memberikan kesempatan bagi IMF dan Bank Dunia untuk membantu Rusia.⁶⁷

Diantara semua pemimpin tersebut, pelaksanaan sentralisme demokratik presiden Vladimir Putin merupakan yang paling sukses jika dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya. Bahkan Lenin yang merupakan pencetus dan orang paling konsisten menerapkan sentralisme demokratik dalam pemerintahan negara ternyata tidak sesukses Vladimir Putin. Hal ini disebabkan antara lain karena pada masa pemerintahan Lenin, negara tersebut baru mengalami transformasi dari pemerintahan berbentuk monarki Kekaisaran Rusia yang sentralisme absolut.

⁶⁶Alkatiri, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁶⁷*Ibid.* hlm.165.

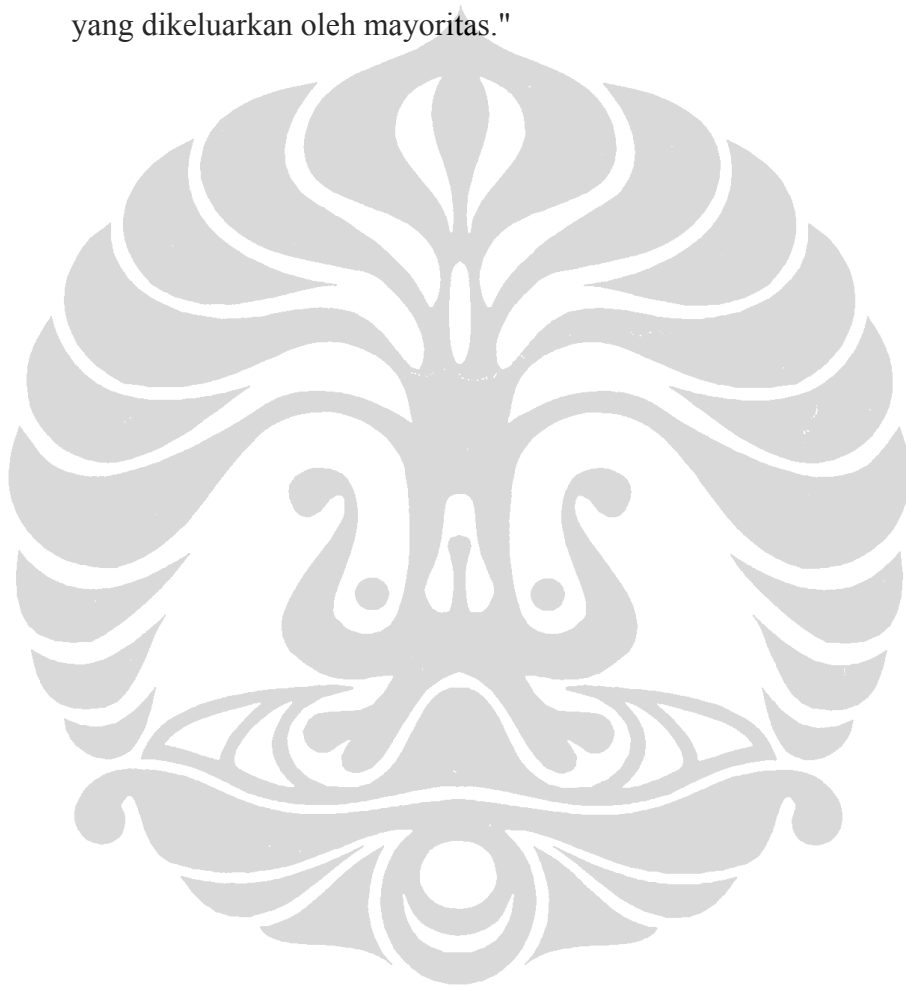
Rakyat menginginkan demokrasi namun masih belum terbiasa. Meskipun pada masa-masa akhir Kekaisaran Rusia demokrasi sudah masuk ke negara tersebut tetapi pelaksanaannya sangat dibatasi. Di sisi lain, rakyat yang selama masa kekaisaran terbelenggu sentralisasi yang dilakukan pemerintah ingin bebas. Perpaduan antara sentralisasi dan demokrasi ini menciptakan kondisi yang sulit bagi rakyat. Kondisi negara yang tidak stabil pasca Revolusi Bolshevik dan perang saudara juga menyebabkan pelaksanaan sentralisme demokratik dalam pemerintahan belum sempurna dan belum dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya karena banyak infrastruktur negara yang harus diperbaiki terlebih dahulu.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi pada masa pemerintahan Vladimir Putin. Rakyat Rusia yang sudah merasakan sendiri kegagalan dan dampak negatif dari demokrasi liberal menginginkan kestabilan dan kejayaan seperti masa Uni Soviet. Sistem politik demokratis, liberalisasi ekonomi dan budaya Barat yang mulai masuk pada masa Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin tidak membawa negara ini menuju kemajuan tetapi justru membuatnya makin terpuruk dan mengalami banyak kemunduran di berbagai bidang salah satunya dalam bidang perekonomian.

Meskipun dalam pelaksanaannya berbeda-beda bahkan mengalami penyimpangan tetapi tujuan dan aspek utamanya tetap tercermin. Tujuan dari sentralisme demokratik sendiri adalah membangun pemerintahan yang kuat dan efektif namun di saat yang bersamaan juga fleksibel. Sedangkan aspek utama sentralisme demokratik adalah “kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi”. Pada masa Uni Soviet “kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi” berlaku dalam pengorganisasian partai. Anggota partai memiliki kebebasan untuk mendiskusikan dan memperdebatkan kebijakan serta tujuan partai namun keputusan partai tetap dibuat oleh suara mayoritas dan semua anggota diwajibkan untuk menjalankan keputusan tersebut.

Pada masa setelah runtuhnya Uni Soviet aspek “kebebasan berdiskusi” terlihat dari adanya kebebasan yang diberikan pemerintah pada masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik seperti *checks and balances* dan Duma (dewan perwakilan rakyat di Rusia) yang memungkinkan masyarakat untuk ikut

mengawasi jalannya pemeritahan dan menyampaikan aspirasinya. Keikutsertaan masyarakat ini direalisasikan lewat pemilu untuk memilih presiden dan dewan perwakilan rakyat. Sedangkan aspek “kesatuan aksi” tampak dari adanya larangan dan penyensoran terhadap media dan pers yang dianggap dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Ini sama seperti pernyataan Lenin yang melarang faksi minoritas di kalangan Bolshevik untuk "mengeluarkan pernyataan di muka umum hal-hal yang bisa mengganggu aksi-aksi atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh mayoritas."



BAB 4

PEREKONOMIAN RUSIA

4.1. Kondisi Perekonomian Rusia Pasca Uni Soviet.

Awal indikasi kehancuran perekonomian Uni Soviet terjadi setelah Nikita Khrushchev mundur pada bulan Oktober 1964. Penggantinya yaitu Leonid Brezhnev (sebagai pemimpin Komite Sentral Partai Komunis) dan Kosygin (sebagai Kepala Pemerintahan) segera mengadakan reformasi ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian Uni Soviet. Berdasarkan Sidang Pleno Komite Sentral PKUS (Partai Komunis Uni Soviet) pada tahun 1965 titik berat perhatian pemerintah ditujukan pada ekonomi pedesaan dan perindustrian untuk memacu pertumbuhan ekonomi.⁶⁸

Reformasi ekonomi ini bukannya berhasil memajukan ekonomi masyarakat desa justru memicu urbanisasi karena melemahnya ekonomi pedesaan. Keadaan yang tak kunjung membaik ini mengakibatkan stagnasi ekonomi hingga pertengahan tahun 1980-an negara tersebut mengalami krisis ekonomi. Meskipun terdapat banyak surplus dari barang yang tidak perlu, namun terdapat juga banyak kekurangan, khususnya barang-barang konsumsi pangan. Komoditas tersebut sebetulnya juga dapat diperoleh hanya saja lewat pasar gelap dengan harga yang sangat tinggi.

Keterpurukan ekonomi negara dapat dilihat dari inflasi tidak terkendali dan harga-harga meningkat dari 3% sampai 7% dalam waktu seminggu. Inflasi yang begitu cepat ini membuat upah rakyat menjadi tidak bernilai, tabungan rakyat menipis dan rubel kehilangan 3/4 nilainya dalam waktu empat bulan. Hal ini menyebabkan barang-barang menjadi langka dan pasar gelap menjamur. Selain itu, negara juga tidak mampu membayar pegawai negerinya, para pensiunan dan tentaranya sehingga mereka terpaksa menerima gaji berupa sayur-mayur hasil

⁶⁸Fahrudji, *Op. Cit.*, hlm. 169.

pertanian kolektif. Bahkan karena kesulitan untuk memberi makan rakyatnya, pemerintah sampai harus mengimpor jutaan ton gandum dari barat.⁶⁹

Pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev, pemerintah melakukan reformasi ekonomi untuk memperbaiki kondisi buruk tersebut dengan cara menggantikan sistem ekonomi sentralistik menjadi sistem ekonomi pasar. Salah satunya adalah dengan privatisasi. Privatisasi yang dilaksanakan pada tahun 1988-1991 ini disebut dengan *Spontaneous Privatization* (Privatisasi Spontan). Namun cara ini tidak menampakkan hasil yang signifikan bahkan memperburuk perekonomian negara. Kebijakan akselerasi percepatan pembangunan (*uskronie*) juga tidak dapat berjalan dengan baik. Demi mempertahankan pergerakan ekonomi, pemerintah membanjiri pasar dengan uang. Seorang asisten Gorbachev menyatakan bahwa percetakan (uang) tidak mampu mengejar target karena mereka harus mencetak rubel 24 jam sehari.⁷⁰ Namun semua usaha yang dilakukan pemerintah tidak mampu mencegah terjadinya krisis ekonomi.

4.2. Penyebab Krisis Ekonomi di Rusia.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kehancuran ekonomi Rusia yang akhirnya menyebabkan krisis ekonomi di negara tersebut. Beberapa faktor itu adalah:

4.2.1. Perang Dingin dan Runtuhnya Tembok Berlin.

Pasca Perang Dunia II, terdapat dua kekuatan baru di dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya berusaha untuk menyebarkan ideologi masing-masing, yaitu Amerika Serikat dengan ideologi liberalis-kapitalis dan Uni Soviet dengan sosialis-komunis.⁷¹ Persaingan dua negara tersebut untuk memperebutkan hegemoni di dunia menyebabkan lahirnya dua blok yaitu Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya) dan Blok Timur (Uni Soviet dan sekutunya). Persaingan antara dua blok inilah yang disebut dengan Perang Dingin.⁷²

Perang perebutan pengaruh di dunia itu ditandai dengan perlombaan senjata, teknologi militer dan pembentukan aliansi militer. Tidak hanya sampai di

⁶⁹Greenspan, *Op. Cit.*, hlm. 119.

⁷⁰*Ibid.* hlm 129.

⁷¹Fred Halliday, Joel Krieger & Margaret E. Crahan, *Cold War* (Oxford, 2001), p. 2e.

⁷²Perang Dingin antara blok barat dan timur berlangsung dari tahun 1946-1980an.

situ, persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet bahkan merambah hingga luar angkasa. Persaingan untuk menguasai luar angkasa tersebut dikenal dengan Perang Bintang. Dalam hal ini teknologi Uni Soviet lebih unggul dari Amerika Serikat dengan keberhasilan Uni Soviet meluncurkan pesawat *Sputnik I* dan *Sputnik II* pada tahun 1957.⁷³ Namun persaingan tersebut telah menguras kas negara karena riset teknologi yang dilakukan menelan biaya yang tidak sedikit. Penempatan kekuatan militer Uni Soviet di kancah konflik internasional seperti di Afganistan dan di negara-negara Eropa Timur juga membutuhkan biaya yang sangat besar yang tentu saja menyedot dana domestik yang tidak sedikit.⁷⁴

Perang Dingin ini pada akhirnya berkembang bukan lagi sebagai perang antara dua ideologi yang berbeda, namun menjadi perang antara dua teori ekonomi yaitu: ekonomi pasar bebas (Amerika Serikat) melawan ekonomi perencanaan terpusat (Uni Soviet). Keduanya terbukti seimbang, walaupun Uni Soviet dan sekutunya ketinggalan secara ekonomi dari Amerika Serikat dan sekutunya, namun mereka terbukti mampu menyusul karena ekonomi pasar barat terlalu boros.⁷⁵ Perang ini menyebabkan kehancuran perekonomian Uni Soviet karena selama perang berlangsung kas negara terkuras untuk mendanai riset teknologi persenjataan, militer dan luar angkasa.⁷⁶

Runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 juga merupakan faktor pemicu hancurnya perekonomian negara.⁷⁷ Dalam tahun-tahun terakhir sebelum runtuhnya Tembok Berlin, angkatan kerja Jerman Timur hanya 1/3 dari Jerman Barat. Hal itu bukan hanya dalam hal angkatan kerja tetapi juga dalam standar kehidupan penduduknya. Pabrik-pabrik di Jerman Timur hanya mampu memproduksi barang-barang yang tidak bermutu dan dikelola dengan asal-asalan selain itu 40% dari bisnis di Jerman Timur dinilai sudah ketinggalan zaman. Faktor-faktor tersebut menyebabkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Modernisasi dan restrukturisasi yang

⁷³ "Sputnik satellite blasts into space, *BBC News*", October 4, 1957. http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/4/newsid_2685000/2685115.stm

⁷⁴ Fahrudji, *Op. Cit.*, hlm. 172.

⁷⁵ Greenspan, *Op. Cit.*, hlm. 124.

⁷⁶ Eustace Mullins, "The \$5 Trillion Cold War Hoax, *The Phoenix Project*", May 21, 1996. <http://www.whale.to/b/mullins6.html>

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 125.

berusaha dilakukan pemerintah Uni Soviet di bawah Mikhail Gorbachev pada saat itu memakan biaya ratusan miliar USD.

Runtuhnya Tembok Berlin yang menandai kejatuhan Blok Timur juga menandai runtuhnya ekonomi perencanaan terpusat dan munculnya ekonomi pasar kompetitif.⁷⁸ Kejatuhan lembaga-lembaga perencanaan terpusat mengancam kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan semua mekanisme pusat produksi dan distribusi ikut hancur. Harga-harga dengan cepat meningkat dari 3% sampai 7% hanya dalam waktu seminggu.⁷⁹

Kegagalan pemerintahan Gorbachev mendekatkan Uni Soviet pada kehancuran. Program *Glasnost* dan *Perestroika* semakin menguatkan gerakan separatisme dan reformasi ekonominya menimbulkan ketidakpuasan di republik-republik konstituen Uni Soviet.⁸⁰ Proses keruntuhan dan pembubaran Uni Soviet sudah muncul sejak awal Desember 1991. Hal ini disampaikan Gorbachev ketika ia menanggapi adanya gejala untuk membentuk negara persemakmuran menggantikan Uni Soviet.⁸¹

Setelah situasi yang makin tidak menentu menyusul kudeta dan demonstrasi di negara tersebut. Akhirnya pada 24 Desember 1991 Mikhail Gorbachev secara resmi mengundurkan diri dan satu hari kemudian pada tanggal 25 Desember 1991 Uni Soviet secara resmi dibubarkan. Pada tahun yang sama sebelum runtuhnya Uni Soviet negara Federasi Rusia sudah diproklamkan pada tanggal 12 Juni 1991 dengan presiden pertamanya Boris Yeltsin.⁸² Maka dengan demikian setelah runtuhnya Uni Soviet secara otomatis Boris Yeltsin menjadi presiden Federasi Rusia yang merupakan pewaris Uni Soviet.

4.2.2. Kebijakan Boris Yeltsin.

Rusia mengalami periode kehancuran ekonomi pada awal 1990-an di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin, meskipun dapat dikatakan bahwa kebebasan menyatakan opini dan elemen-elemen demokrasi

⁷⁸Greenspan, *Op. Cit.*, hlm. 116.

⁷⁹*Ibid.* hlm. 129.

⁸⁰Fahrurudji, *Op. Cit.*, hlm. 184.

⁸¹Alkatiri *Op. Cit.*, hlm. 79.

⁸²*Ibid.*

lainnya cukup berkembang pada masa itu.⁸³ Namun perekonomian di negara tersebut benar-benar terpuruk. Berbagai cara diupayakan oleh presiden Boris Yeltsin dan orang-orang di pemerintahannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara. Berikut kebijakan-kebijakan yang dijalankan presiden Boris Yeltsin untuk memperbaiki perekonomian di Rusia:

4.2.2.1. *Shock Therapy* (Terapi Kejut).

Program *Shock Therapy* dijalankan di Rusia pada Januari 1992 oleh Yegor Gaidar yang diangkat presiden Boris Yeltsin sebagai Wakil Perdana Menteri Pertama pada tahun 1991. Kebijakan ini meliputi: liberalisasi, stabilisasi dan privatisasi. Kebijakan ini berdasarkan atas prinsip neoliberal dari IMF, Bank Dunia dan Departemen Keuangan AS yang tertuang dalam “Konsensus Washington”. Program-program liberalisasi dan stabilisasi yang dirancang ini condong ke arah reformasi yang radikal.

Pemerintah melakukan liberalisasi dan stabilisasi dengan cara menghapuskan kontrol harga oleh negara seperti pada masa Uni Soviet dan memberikan kontrol harga pada pasar, mengizinkan import asing secara besar-besaran ke Rusia untuk mengurangi monopoli perusahaan-perusahaan Rusia, memotong subsidi negara terhadap industri dan peternakan serta menaikkan suku bunga dan pajak. Program ini memang memungkinkan adanya persaingan bebas namun ini juga berarti satu pihak akan diuntungkan dan pihak lainnya akan dirugikan. Tergantung pada pihak tersebut termasuk golongan industri, kelas, kelompok umur, kelompok etnik apa dan di daerah atau sektor mana mereka berada. Kelompok yang berada dalam posisi yang lemah biasanya menjadi korban dari liberalisasi ini karena mereka tidak mampu bersaing.

Model pendekatan ini memang memberikan perangsang yang lebih kuat pada sistem ekonomi baru dan mempercepat realokasi, sumber daya dan lebih cepat meningkatkan efisiensi. Akan tetapi model ini dapat membebani warga dalam bentuk pengurangan drastis upah, kesempatan kerja dan konsumsi. Dengan kata lain, model *Shock Therapy* tidak dapat bekerja dengan efisien, bila masyarakat tidak bersedia menerima dampak beban pengorbanannya.

⁸³Sabam Siagian, “Vladimir Putin, Tokoh Utama 2007, Suara Pembaharuan Daily”, 22 desember, 2007. <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/22/Editor/edit02.htm>.

Dengan berjalannya waktu terbukti bahwa program ini tidak memberikan hasil yang sesuai dengan harapan di Rusia. *Shock Therapy* ini ternyata jauh lebih mengejutkan masyarakat di Rusia daripada di Polandia. Ukuran negara tersebut, kekakuan sistemnya, fakta bahwa negara telah didikte secara ekonomi sepanjang kehidupan rakyatnya adalah penyebab tidak efektifnya program ini.

4.2.2.2. *Gradualisme* (Model Bertahap).

Pelaksanaan *Shock Therapy* yang tidak berhasil di Rusia mendorong pemerintah untuk beralih menggunakan model pendekatan gradualisme. Hal ini karena *Shock Therapy* dianggap terlalu beresiko tinggi.⁸⁴ Transisi dari perekonomian berencana terpusat ke perekonomian berdasarkan pasar dianggap dapat menyebabkan traumatis. Berdasarkan pandangan tersebut Wakil Perdana Menteri Pertama bidang Ekonomi, Anatoly Chubais menggunakan model bertahap (*gradualisme*) di samping model *Shock Therapy*.⁸⁵

Gradualisme dikenal sebagai model tahapan atau model berangsur-angsur yang dianggap mudah diserap dan dampaknya mudah dinetralisir oleh struktur dan sistem yang masih tersisa dari model ekonomi berencana yang terpusat. Meskipun terdapat banyak perubahan namun ciri ekonomi sentralistik masih dapat digunakan dan direduksi secara bertahap seperti monopolisasi, ketergantungan manajer perusahaan pada badan partai sehingga menjadi kaku dan tidak fleksibel.⁸⁶

4.2.2.3. Privatisasi.

Pada Oktober 1991, presiden Boris Yeltsin menyatakan bahwa Rusia akan menjalankan reformasi ekonomi menuju mekanisme pasar secara radikal, didalamnya termasuk program privatisasi perusahaan-perusahaan negara. Privatisasi yang terjadi di Rusia ini sering disebut dengan *Insider Privatization* atau *Oligarch Privatization*. Mereka menerbitkan voucher bagi 144 juta penduduk

⁸⁴ Alkatiri, *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

Rusia dan mulai memprivatisasi perusahaan dan real estate milik negara dalam skala besar-besaran.⁸⁷

Berikut model privatisasi yang dijalankan di Rusia pada masa pemerintahan presiden Boris Yeltsin:

1. *Voucher Privatization* (Privatisasi dengan Kupon).

Privatisasi dengan sistem kupon dilaksanakan pada tahap pertama program ini. *Voucher Privatization* adalah privatisasi dengan cara membagikan kupon yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki saham di beberapa perusahaan negara. Privatisasi dengan kupon digunakan di beberapa negara di Eropa Tengah dan Timur seperti Rusia, Polandia, Slovenia dan Ceko pada dekade 1990an. Terdapat dua macam privatisasi dengan model ini, yaitu:

- Privatisasi dengan *Mass Voucher* (Kupon Massal).

Pada Oktober 1992 presiden Boris Yeltsin dan para ekonomnya meluncurkan program reformasi ekonominya yang kedua. Program kedua ini dilaksanakan dengan menerbitkan kupon bagi warga Rusia dan mulai memprivatisasi perusahaan milik negara dalam skala besar.

Privatisasi ini dilakukan dengan cara membagikan kupon kepemilikan saham yang nilainya setara dengan 10.000 rubel (setara dengan dua puluh bulan upah minimum) secara massal kepada warga⁸⁸. Privatisasi dengan sistem kupon ini berlaku mulai Oktober 1991. Cara ini bertujuan agar negara tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk melaksanakan dan mensukseskan privatisasi yang sedang dilaksanakan pemerintah karena kupon tersebut dapat dijual kembali. Selain itu warga memiliki kesempatan yang sama atas hak kepemilikan perusahaan negara tanpa resiko investasi substansial karena kupon tersebut dapat diuangkan atau dijual kembali.

Reformasi dengan cara ini juga kurang efektif dibanding di negara-negara Eropa Timur lainnya. Banyak warga terutama yang berasal dari golongan miskin menjual kupon tersebut pada pengusaha atau bank sehingga hak kepemilikan tersebut kembali menjadi milik

⁸⁷Greenspan, *Op. Cit.*, hlm. 132.

⁸⁸Leslie Holmes, *Post Communism: An Introduction* (Cambridge, 1997), p. 211

kalangan tertentu saja. Hal ini didorong oleh kondisi ekonomi yang kian memburuk sehingga warga lebih memilih untuk mendapatkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya daripada memiliki saham. Hingga akhir tahun 1993, sekitar 50 juta orang menjual kupon mereka.⁸⁹ Penjualan saham yang terus-menerus itu menyebabkan harga saham yang akan diprivatisasi meningkat pesat. Pada akhir Maret 1993, diperlukan 70 sampai 110 lembar kupon untuk mendapatkan 3,7% saham yang sama pada Desember 1992 sehingga kupon-kupon yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak ada harganya lagi.⁹⁰

- Privatisasi dengan penawaran saham kepada pegawai BUMN.

Pada pertengahan tahun 1992, dikeluarkan Dekrit Presiden No. 341 yang menyatakan penyerahan hak kepemilikan saham sebesar 25% kepada serikat pekerja BUMN yang bersangkutan tanpa hak voting. Serikat pekerja dimungkinkan untuk menambah sahamnya sebesar 10% dengan potongan harga hingga 30% dari harga jual saham. Kelompok manajer tingkat atas yaitu para direktur BUMN berhak menguasai 5% saham.⁹¹ Namun kebijakan ini berubah pada tahun 1993 dengan memperbesar kemungkinan penguasaan 51% saham oleh perkumpulan serikat pekerja dengan para manajer BUMN dengan harga penuh.

Cara privatisasi ini dilaksanakan hampir bersamaan dengan dilaksanakannya sistem kupon massal. Tujuan dari privatisasi ini adalah agar kepemilikan saham BUMN yang diprivatisasi akan lebih banyak menjadi milik karyawannya sendiri karena adanya kekhawatiran dari Serikat Industrialis dan Pengusaha Rusia (*RUIE / Russian Union of Industrialist and Entrepreneurs*) bahwa privatisasi

⁸⁹Wilhem Eberwein & Jochen Tholen. *Market or Mafia: Russian Managers on the Difficult Road Towards an Open Society* (1997).

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Presidential Decree No. 341 to accelerate the privatization of State and municipal enterprises (Text No. 93).

dengan sistem kupon massal akan membuat kepemilikan BUMN tersebar luas dan tidak terkontrol.⁹²

2. *Loan for Shares* (Pinjaman untuk Saham).

Privatisasi dengan cara ini dilaksanakan pada tahap kedua program privatisasi yaitu *cash-privatization* yang berlangsung tahun 1995-1996 dan pada tahap ketiga yaitu *case-by-case* yang berlangsung tahun 1997.⁹³ Privatisasi ini bertujuan untuk menambah pendapatan negara lebih besar lagi dengan cakupan industri skala besar seperti industri ekstraktif, energi, logam dan telekomunikasi dari perusahaan-perusahaan besar seperti Yukos, Lukoil, Sindako dan Norilsk Nikel.

Privatisasi cara ini sering disebut sebagai privatisasi terburuk yang pernah dijalankan. Dalam privatisasi ini pemerintah meminjam dana pada bank-bank swasta (bukannya pada Bank Sentral). Kebanyakan dari bank-bank sentral ini merupakan milik dari kroni-kroni pemerintah. Sebagai syarat dari pinjaman ini adalah pemerintah memberikan saham-saham BUMN sebagai jaminan. Akibatnya pada saat pemerintah gagal membayar pinjaman tersebut, maka bank-bank swasta itu mengambil alih perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.⁹⁴

Privatisasi di Rusia merupakan contoh dari privatisasi yang terburu-buru dan tidak matang. Karena privatisasi tanpa infrastruktur kelembagaan (*corporate governance*)⁹⁵ yang jelas akan mendorong penjualan aset-aset negara daripada penginvestasian kembali untuk masa depan negara. Selain itu tidak adanya legitimasi hukum membuat para oligarki memiliki celah untuk mengambil alih

⁹²John Logue, Sergey Plekhanov and John Simmons (eds.), *Transforming Russian Enterprises: From State Control to Employee Ownership* (1995).

⁹³Hilary Appel, "Voucher Privatisation in Russia: Structural Consequences and Mass Response in the Second Period of Reform, *Europe-Asia Studies*", Vol. 49, No. 8 (Dec., 1997), pp. 1433-1449.

⁹⁴Stiglitz, *Op. Cit.*, hlm. 224)

⁹⁵Corporate Governance didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuannya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. (*Ibid.*, hlm. 221)

aset-aset negara dan membawa dana-dana mereka keluar dari Rusia dengan mudah.

Proses privatisasi di Rusia hanya menguntungkan kelompok tertentu yang dekat dengan orang-orang di pemerintahan. Kelompok-kelompok tersebut menguasai aset-aset penting negara seperti minyak, gas, listrik dan sumber-sumber alam vital lainnya. Kelompok orang kaya ini kemudian dikenal dengan sebutan Oligarki. Mereka ini kemudian membentuk lingkaran dalam (*inner circle*) yang mendukung sekaligus memanfaatkan kekuasaan rezim Boris Yeltsin.⁹⁶

Program ini pada akhirnya bukan saja gagal memperbaiki perekonomian, namun justru semakin memperburuk perekonomian. Bahkan privatisasi di Rusia disebut sebagai contoh privatisasi terburuk karena dalam pelaksanaannya banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang merugikan negara dan menguntungkan kelompok tertentu. Program ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil keuntungan. Biasanya dengan cara menjual perusahaan-perusahaan negara di bawah harga standar pasar untuk mendapatkan nilai aset yang sangat besar. Sayangnya keuntungan tersebut tidak masuk ke kas negara tetapi ke rekening-rekening kelompok tertentu.

4.2.3. Korupsi, Skandal Keuangan, dan Penggelapan Pajak.

Kehancuran ekonomi Rusia selain disebabkan karena tatanan ekonomi yang buruk pada masa Uni Soviet dan kesalahan strategi dalam masa perbaikan ekonomi juga dikarenakan adanya berbagai korupsi, skandal dan penggelapan pajak yang melibatkan pejabat-pejabatnya. Para pejabat-pejabat negara telah menyelewengkan dana bantuan dan menerima suap dari berbagai pihak sehubungan dengan program privatisasi.

Dari penelitian Bank Dunia mengenai korupsi, ditulis bahwa Rusia merupakan salah satu negara terkorp di dunia. Kebanyakan dana pinjaman yang diperoleh negara diselewengkan oleh keluarga dan rekan-rekan pejabat yang korup dan kaum oligarki. Bahkan terjadi pengurusan terhadap aset-aset negara oleh pihak-pihak tertentu selama masa privatisasi. Pada akhirnya rakyat miskin

⁹⁶Fahrudji, *Op. Cit.*, hlm. 202.

menjadi semakin miskin dan para miliader menjadi semakin kaya dengan hasil dari merampok aset negara.

Korupsi di Rusia yang berkaitan dengan adanya program privatisasi terjadi pada era 1990an. Sampai akhir tahun 1993 hampir 40% perusahaan, termasuk restoran, kafe, toko dan hotel sudah diprivatisasi.⁹⁷ Pada pertengahan tahun 1994 hampir 70% ekonomi Rusia dikelola oleh perusahaan swasta dan industri yang berkaitan dengan hasil tambang sudah dimiliki secara perorangan oleh industriawan baru.⁹⁸ Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses privatisasi sedikit demi sedikit terkuak. Pada April 2004, kantor audit negara Rusia mengeluarkan laporan yang isinya antara lain bahwa dari 140 perusahaan yang diprivatisasi pada tahun 1990-an 56 diantaranya telah melakukan pelanggaran hukum.⁹⁹

Pelanggaran tersebut umumnya terjadi pada saat proses pengambil alihan saham BUMN oleh pihak swasta dengan memakai orang-orang dalam pemerintahan demi keuntungan pribadi bukan negara. Sebagai contoh adalah pengambil alihan BUMN sebagai akibat dari privatisasi *Loan for Shares*. Pemerintah melakukan "*sham sale*" atau penjualan pura-pura (walaupun secara formal pemerintah telah melakukan lelang / tender), namun dalam proses lelang / tender tersebut telah terjadi korupsi dan kolusi.¹⁰⁰ Saham-saham tersebut diupayakan untuk jatuh ke tangan para oligarki dan kolega-kolega dekat pemerintah dengan harga yang murah. Hasil dari penjualan saham itu pun tidak sedikit yang akhirnya masuk ke dalam rekening-rekening pejabat pemerintah bukannya ke dalam kas negara.

Skandal keuangan yang paling terkenal adalah Skandal Fimaco karena skandal ini juga melibatkan Bank Sentral Rusia dan IMF. Fimaco adalah lembaga keuangan yang berbasis di kota Jersey, Channel Island yang berada di wilayah Inggris. Fimaco (Finance Investment Management Company) didirikan pada awal dekade 1990-an hanya dengan modal awal 1.000 USD dan sebagian sahamnya

⁹⁷Alkatiri, *Op. Cit.*, hlm. 94.

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 127.

⁹⁹Marshall L. Goldman, "Putin and the Oligarchs, *Foreign Affair*", November-December, 2004.

¹⁰⁰Stiglitz, *Op. Cit.*, hlm. 224.

dimiliki Bank Sentral Rusia.¹⁰¹ Kasus ini berhasil dibongkar pada 1 Februari 1999 pada saat Vladimir Putin menjabat sebagai Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia.

Terbongkarnya kasus ini berawal dari surat yang dikirim Yury Skuratov (Jaksa Agung Rusia) pada Gennady N. Seleznev (Ketua Duma). Isi surat tersebut adalah informasi bahwa Bank Sentral Rusia telah menempatkan dana sebesar 50 milyar USD di sebuah perusahaan asing. Penempatan dana tersebut mengundang kecurigaan karena biasanya bank sentral negara akan menempatkan cadangan devisa di pusat-pusat keuangan internasional.

Skandal ini ternyata sudah dimulai sejak tahun 1993 pada saat berjalannya program privatisasi di Rusia. Dana-dana tersebut kebanyakan merupakan hasil dari penjualan BUMN yang diprivatisasi dan dana pinjaman dari IMF. Dana-dana yang digelapkan ini digunakan untuk membiayai bisnis oligarki dan para pejabat negara yang korup. Terungkap juga bahwa dana-dana tersebut ternyata untuk membeli kembali aset-aset negara yang diprivatisasi. Dengan menanamkan saham di surat berharga yang diterbitkan pemerintah, mereka bisa mendapat untung hingga 300% per tahun.

Dari hasil audit yang dilakukan PriceWaterhouse Coopers sebagai pihak yang ditunjuk IMF untuk menyelidiki skandal ini, ditemukan beberapa institusi, perusahaan dan individu yang terlibat. Institusi yang terlibat adalah IMF dan Bank Dunia. Pada 18 Februari 1998, Oleg Mozhaiskov (Deputi Gubernur Bank Sentral Rusia) mengatakan bahwa IMF tahu soal pemindahan dana pinjaman dari Bank Sentral Rusia ke Fimaco namun mereka tidak melakukan pencegahan bahkan berpura-pura tidak tahu. Bahkan PriceWaterhouse Coopers mengakui bahwa mereka hanya melakukan pemeriksaan secara terbatas.¹⁰²

Selain IMF pihak lain yang terlibat antara lain: Euro Bank yang sekitar 23% sahamnya dimiliki pengusaha-pengusaha Rusia, Nessim Goan sebuah lembaga kreditor asal Geneva Swiss dan tentunya Bank Sentral Rusia sendiri sebagai pihak yang menampung cadangan devisa negara baik yang berasal dari pendapatan dalam negeri maupun pinjaman luar negeri Rusia.

¹⁰¹ "Moscow Isn't Rushing to Follow the Trail of Dirty Money, *BusinessWeek*", Sept 8, 1999. <http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/sep1999/nf90908a.htm>

¹⁰² Alvin Rabushka and Michael S. Bernstam, "Fixing Russia's Banks, Again", March 5, 2001. www.russianeconomy.org.

Beberapa pejabat, pengusaha dan kolega presiden Boris Yeltsin juga diduga kuat ikut terlibat. Mereka yang terlibat itu adalah: Aksenenko dan Khristenko keduanya adalah mantan Deputy Perdana Menteri Rusia, Sergey Dubinin Gubernur Bank Sentral Rusia pada (1995-1998), Roman Abramovich seorang oligarki dan anggota Dewan Direksi Sibneft, Mikhail Kasyanov Wakil Menkeu Rusia yang menangani urusan hutang luar negeri Rusia dan Konstantin Kagalovsky Mantan Direktur IMF untuk Rusia(1992-1995).

Kasus lainnya yang juga terkenal adalah penangkapan atas Mikhail Khodorkovsky pada Oktober 2003. Khodorkovsky adalah konglomerat Rusia keturunan Yahudi pemilik Yukos yang merupakan sebuah perusahaan minyak terbesar di Rusia pada era presiden Boris Yeltsin.¹⁰³ Yukos dulunya adalah perusahaan minyak raksasa milik pemerintah Rusia. Setelah krisis ekonomi menimpa Rusia atas saran IMF dan Bank Dunia, pemerintah memprivatisasi berbagai perusahaan milik negara salah satunya Yukos. Khodorkovsky dan banyak pengusaha lainnya lah yang membeli perusahaan-perusahaan negara tersebut.

Khodorkovsky ditangkap atas tuduhan utama penggelapan pajak sebesar 27 miliar USD dengan menipu dan menyuap aparat perpajakan. Kesalahan lain yang juga dituduhkan padanya adalah penipuan pada saat berjalannya program privatisasi dengan memindahkan kepemilikan aset swasta Rusia ke swasta asing. Namun kesalahan terbesarnya adalah menantang presiden Vladimir Putin dengan membiayai partai oposisi dan menyuap anggota parlemen di Duma agar mengagalkan rencana kenaikan pajak bagi perusahaan minyak yang direncanakan pemerintahan presiden Vladimir Putin.¹⁰⁴

Selain karena kesalahan-kesalahannya tersebut, beberapa pihak melihat bahwa penangkapan atas Khodorkovsky lebih bermuatan politik terkait isu akan pencalonan diri Khodorkovsky sebagai presiden dan untuk memuluskan rencana presiden Vladimir Putin untuk nasionalisasi semua aset-aset negara yang sempat

¹⁰³David Storobin, “*Arrest of Khodorkovsky: Threat to Russian Democracy and Economy*”, April 6, 2005. <http://www.globalpolitician.com/2812-khodorkovsky-russia>.

¹⁰⁴David Satter, “The Arrest of Mikhail Khodorkovsky, *National Review Online*”, November 6, 2003. <http://www.nationalreview.com/comment/satter200311060916.asp>

diprivatisasi.¹⁰⁵ Selain menangkap Khodorkovsky sebagai pemilik utama Yukos, pemerintah juga menangkap Platon Lebedev yaitu pemegang saham terbesar Yukos. Bahkan Vasily Shakhovsky yang memiliki saham 4,5% di Yukos terancam dibatalkan keikutsertaannya dalam pemilihan anggota parlemen oleh Kejaksaan Agung Rusia agar ia tidak mendapatkan kekebalan hukum dari tuduhan penggelapan pajak.¹⁰⁶

4.2.4. Campur Tangan Pihak Asing: IMF, Bank Dunia dan Amerika Serikat.

Menurut Joseph E. Stiglitz,¹⁰⁷ para penasehat barat, khususnya yang berasal dari Amerika Serikat dan IMF, yang masuk begitu cepat untuk memberikan kotbah tentang kebaikan ekonomi pasar juga harus disalahkan atas dukungan mereka kepada para pemimpin Rusia untuk menganut fundamentalisme pasar sebagai pengganti sistem Marxisme yang memang terbukti tidak sempurna. Hal ini dikarenakan mereka ingin membuat negara-negara yang menjalankan sistem ekonomi terpusat beralih ke sistem ekonomi pasar dengan cepat.

Keputusan-keputusan yang diambil IMF berdasarkan atas percampuran ideologi dan ekonomi yang buruk. Ketika krisis terjadi, IMF memberikan solusi-solusi yang ketinggalan jaman, tidak tepat dan merupakan solusi yang standar tanpa mempertimbangkan berbagai pengaruh yang timbul terhadap masyarakat di negara-negara yang diminta menjalankan kebijakan tersebut. Lebih jauh lagi Stiglitz menyatakan bahwa dalam IMF jarang terdapat perdebatan dan analisa mendalam mengenai konsekuensi-konsekuensi dari berbagai kebijakan alternatif yang ada. Hanya ada satu resep, pendapat-pendapat alternatif tidak dicari dan perdebatan yang jujur serta terbuka sangat dibatasi.

Pemberian pinjaman IMF kepada Rusia tanpa disadari justru semakin mendorong negara tersebut berhutang lebih besar. Biaya dari kesalahan-kesalahan dalam proses pemberian pinjaman tersebut tidak ditanggung oleh pejabat IMF yang memberikan pinjaman atau bankir Amerika Serikat yang telah mendesaknya atau bankir barat dan kaum oligarki yang telah mengambil keuntungan dari

¹⁰⁵ "When Power Collide: Putin vs Khodorkovsky, *BusinessWeek*", May 31, 2004. http://www.businessweek.com/magazine/content/04_22/b3885101_mz054.htm

¹⁰⁶ "Yukos Dicurigai Pindahkan Uang Tunai, *Suara Merdeka*", 31 Oktober 2003. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0310/31/int3.htm>

¹⁰⁷ Stiglitz, *Op. Cit.*, hlm. 188.

pinjaman tersebut melainkan ditanggung oleh rakyat sebagai pihak pembayar pajak Rusia.

Dengan berjalannya waktu banyak orang di Rusia dan di tempat lain menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang gagal tersebut bukan hanya kebetulan. Kebijakan tersebut sengaja dilakukan untuk melemahkan Rusia agar tidak menjadi ancaman bagi Amerika Serikat.¹⁰⁸ Kebijakan-kebijakan tersebut semata-mata hanya demi kepentingan ekonomi Amerika Serikat.

Hal ini dapat dilihat dari apa yang terjadi pada tahun 1991-2000, pihak barat (Amerika Serikat) gencar mempromosikan sistem pasar bebas dan demokrasi di Rusia. Demi melancarkan promosinya, mereka membangun jaringan media baik cetak maupun elektronik. Banyak majalah dan jurnal ilmiah internasional yang ditulis oleh pengamat Rusia dari Amerika Serikat yang menulis tentang privatisasi, *shock therapy*, liberalisasi dan demokrasi untuk mempengaruhi rakyat Rusia. Kehadiran Soros Foundation di negara tersebut pada era Mikhail Gorbachev juga menunjukkan betapa gencar pihak barat mempromosikan sistem ekonomi pasar bebas.¹⁰⁹

Pihak barat juga dituding sengaja merusak perekonomian Rusia. Rusia menjalankan bisnis yang korup dengan bantuan presiden George W. Bush dan terutama di bawah pemerintahan presiden Bill Clinton yang berkerja sama dengan bankir Wall Street, Departemen Keuangan Amerika Serikat, Harvard Institute for International Development serta para manipulator dari lembaga keuangan seperti Nordex, IMF, Bank Dunia dan Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve).¹¹⁰ Harian *Nezavisimaya Gazeta*¹¹¹ dan *Times London* juga menulis bahwa Amerika Serikat memang tidak berniat menolong Rusia tetapi justru menghancurkannya.

Pada akhirnya Rusia menyadari bahwa pinjaman-pinjaman dan solusi-solusi dari pihak asing yaitu IMF, Bank Dunia dan Amerika Serikat merugikan. Selain pinjaman-pinjaman tersebut membuat negara berhutang makin banyak dan

¹⁰⁸*Ibid.* 240.

¹⁰⁹Alkatiri *Op. Cit.*, hlm. 104.

¹¹⁰Berdasarkan pernyataan Anne Williamson dalam "*The Rape of Russia*" (www.russian.org)

¹¹¹Dalam *Nezavisimaya Gazeta* pengamat Rusia, Boris Kagarlitskaya menyebut bahwa dana pinjaman IMF untuk Rusia sengaja untuk menjebak Rusia agar mau mengikuti resep ekonomi mereka.

sistem ekonomi yang makin kacau tetapi juga karena mereka berhasil melakukan intervensi kedalam kehidupan politik negara.

4.2.5. Krisis di Asia Timur dan Asia Tenggara yang Menyebabkan Jatuhnya Harga Minyak Dunia.

Tidak ada yang menyangka sebelumnya bahwa jatuhnya mata uang Baht Thailand pada tanggal 2 Juli 1997 merupakan awal dari terjadinya krisis ekonomi terbesar setelah *Great Depression* (Depresi Besar).¹¹² *Great Depression* merupakan depresi ekonomi terburuk yang pernah terjadi. Depresi ekonomi ini terjadi pada 29 Oktober 1929 yang dikenal dengan *Black Tuesday* (Selasa Kelabu), saat pasar modal jatuh.¹¹³ Kejatuhan pasar modal ini terjadi pada hari kamis sebelumnya saat pasar mengalami penurunan 9%. Depresi ini memberi efek ke semua negara di dunia, baik yang miskin maupun yang kaya. Negara-negara di seluruh dunia terpukul perekonomiannya terutama negara yang bergantung pada sektor industri berat. Depresi ini menyebabkan banyak perusahaan konstruksi berhenti membangun, harga *real estate* turun drastis, pertanian dan perkebunan pun mengalami kerugian besar karena harga-harga yang turun mencapai 60%.¹¹⁴ Depresi ini baru berakhir pada akhir tahun 1930an, di beberapa negara depresi bahkan baru berakhir pada tahun 1940an pada saat terjadinya Perang Dunia II.

Mata uang baht Thailand yang jatuh 25% hanya dalam waktu semalam memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian di kawasan Asia Timur dan Tenggara.¹¹⁵ Dampak tersebut dengan cepat menyebar hingga Malaysia, Korea, Filipina dan Indonesia. Krisis ini menyerang perbankan dan pasar saham. Krisis yang terjadi di Asia Timur dan Tenggara pada tahun 1998 menjadi salah satu faktor makin terpuruknya perekonomian Rusia. Resesi dan depresi yang melanda negara-negara di kawasan tersebut menyebabkan permintaan akan minyak tidak hanya gagal meningkat tetapi justru semakin menurun. Kejatuhan harga minyak hingga hanya mencapai 11 USD per barel merupakan titik terendah dalam dua puluh lima tahun terakhir merupakan dampak dari krisis Asia yang melemahkan

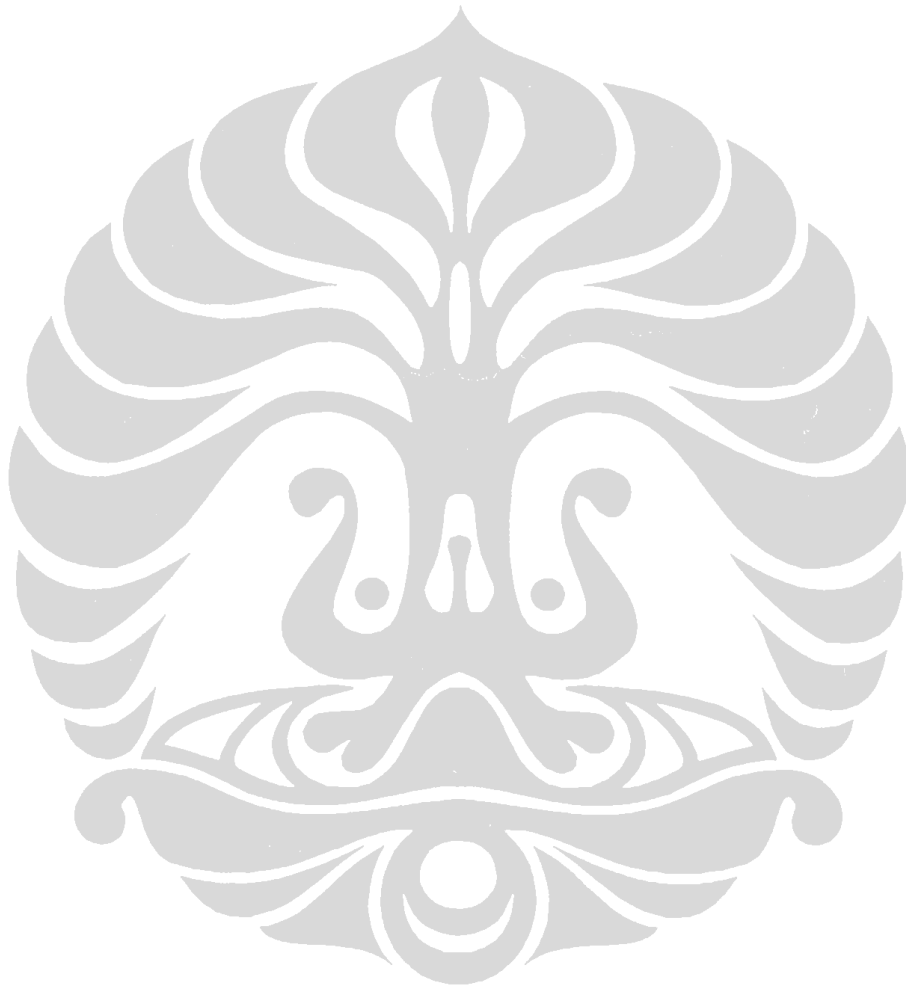
¹¹²Stiglitz, *Op. Cit.*, hlm. 125.

¹¹³Allida Black and June Hopkins, *The Eleanor Roosevelt Papers, The Great Depression, Teaching Eleanor Roosevelt* (New York, 2003).

¹¹⁴Lihat *World Economic Survey 1932-1933*. League of Nations: 43.

¹¹⁵Stiglitz, *Op. Cit.*, hlm. 125.

permintaan dunia.¹¹⁶ Ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan minyak inilah yang memicu jatuhnya harga-harga minyak mentah (turun sampai 40% pada enam bulan pertama di tahun 1998 dibandingkan dengan harga rata-rata pada tahun 1997).¹¹⁷ Hal ini tidaklah mengherankan karena minyak merupakan komoditas ekspor dan sumber pendapatan pajak pemerintah yang utama bagi Rusia, sehingga kejatuhan harga-harga memiliki dampak yang besar bagi perekonomian Rusia.



¹¹⁶Greenspan, *Op. Cit.*, hlm. 116.

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 204.

BAB 5

KEBIJAKAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN

5.1. Kebijakan yang Dijalankan.

Untuk memperbaiki keadaan perekonomian yang buruk dan mengatasi krisis ekonomi yang melanda Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, presiden Vladimir Putin menjalankan beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi saja tetapi juga meliputi kebijakan politik dan sosial. Karena faktor politik dan ekonomi merupakan faktor yang selalu saling melengkapi dan bersifat resiprokal. Keduanya merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, sering terjadi konflik krusial dalam menjembatani antar keduanya.¹¹⁸

Berikut ini kebijakan-kebijakan yang dijalankan presiden Vladimir Putin untuk memperbaiki kondisi perekonomian dan mengatasi krisis ekonomi di Rusia selama masa kepemimpinannya yaitu dari tahun 2000-2008:

5.1.1. Mereformasi Duma dan Lembaga Pemerintahan.

Pada masa kepemimpinannya, presiden Vladimir Putin melakukan reformasi terhadap Duma dan Lembaga-lembaga pemerintah lainnya agar hanya berpihak kepada Kremlin. Hal ini menyebabkan Duma dan Lembaga-lembaga pemerintah tersebut menjadi lebih lemah dibandingkan presiden dan pemerintah bahkan dalam beberapa hal Duma justru berada di bawah kendali presiden Vladimir Putin.¹¹⁹

Duma adalah Badan Representatif Rusia yang merupakan hasil dari Revolusi Rusia 1905. Duma dibentuk tahun 1906 yang merupakan perluasan dari *Count Witte* yaitu majelis rendah dengan beberapa anggota yang ditunjuk oleh tsar dan lainnya dipilih oleh bangsawan, *zemstvo*, pendeta, kalangan pedagang dan industri serta sivitas akademi universitas. Saat Tsar Nikolay II menyadari bahwa

¹¹⁸Alkatiri, *Op. Cit.*, hlm. 83.

¹¹⁹Lihat Thomas F. Remington, "Putin and the Duma, *Post-Soviet Affairs*", Vol.17, No.4, 2001, pp.285-308. Dimitri K. Simes, "Russia's Crisis, America's Complicity, *The National Interest*", No 54. Winter, 1998/1999.

Duma telah menjadi lawan politiknya, ia membekukan Duma setelah 10 minggu. Duma kedua (1907) yang lebih bertentangan dengan pemerintah pun akhirnya juga dibekukan. Duma ketiga (1907-1912) adalah hasil dari perubahan yang terjadi dalam pemerintahan. Duma ketiga memperluas hak petani dan mengundang beberapa hukum buruh. Duma keempat (1912-1917) memiliki kekuasaan yang konservatif sehingga memperuncing konflik dengan tsar. Duma keempat ini akhirnya dibekukan oleh Tsar Nikolay II pada Maret 1917, namun menolak untuk dibubarkan.¹²⁰

Sebelum masa Vladimir Putin, Duma digunakan untuk mempengaruhi intra-pemerintahan dengan menjalin hubungan langsung ke individu-individu dalam kementerian dan perwakilan pemerintah yang digunakan untuk melobi dukungan untuk kepentingan tiap kementerian. Praktek ini dilarang pada April 2000, saat tiap kementerian diperintahkan untuk membuat kesepakatan dengan Duma hanya lewat perwakilan resmi pemerintahan untuk Duma.¹²¹ Setelah presiden Vladimir Putin berkuasa, ia mereformasi Duma dan Lembaga Pemerintahan maka Parlemen baik Majelis Tinggi (Dewan Federasi) maupun Majelis Rendah (Duma), dikuasai partai-partai pendukung presiden Vladimir Putin, terutama Partai Rusia Bersatu (*United Russia*) yang menguasai 309 dari 450 kursi Duma. Hal ini membuat kelompok oposisi tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan.

Dalam Pemilu Parlemen Desember 2007, kelompok pendukung presiden Vladimir Putin mengeluarkan kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut berupa kenaikan *electoral treshold* dari 5% menjadi 7% dan dengan meniadakan pilihan suara *against all*. Dengan demikian berarti peluang tokoh oposisi seperti mantan PM Kasyanov dan juara catur dunia Gary Kasparov untuk berkuasa menjadi sangat kecil.¹²² Selain itu reformasi yang dilakukan presiden Vladimir Putin telah membuat peran Duma dan lembaga-lembaga pemerintahan tak ubahnya seperti “tukang stempel” yang akan melancarkan, menyetujui dan mengesahkan rancangan Undang-undang yang diajukannya. Seperti nasionalisasi, penetapan

¹²⁰Lihat V. A. Maklakov, *The First State Duma*(tr.1964) dan A. Levin, *The Second Duma*(2d ed. 1966)

¹²¹Remington, *Op. Cit.*

¹²²Susanto Pudjo Martono, “Siapa Pengganti Putin, *Kompas*”, 28 September, 2007. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0709/28/ln/3870742.htm>

tarif pajak baru, administrasi sektor industri, peraturan investasi baru, monopoli sumber daya alam dan kontrol migas.

5.1.2. Menghapus Pemilu Regional Gubernur dan Kursi Parlemen Kelompok Independen.

Selain mereformasi Duma dan Lembaga Pemerintahan, presiden Vladimir Putin juga menghapuskan pemilihan langsung regional untuk pemilihan gubernur. Hal ini dipicu oleh terjadinya serangan teror yang menewaskan lebih dari 300 murid sekolah di Beslan pada 4 September 2004. Kemudian pada 13 September 2004, presiden Vladimir Putin mengumumkan rencana penghapusan pemilihan umum (pemilu) regional untuk pemilihan gubernur di 89 provinsi.¹²³

Calon gubernur tiap daerah akan terlebih dahulu dinominasikan kepada presiden sebelum dipilih dan presiden berhak menerima atau menolak daftar nama para nominasi gubernur tersebut. Dengan demikian para gubernur provinsi kehilangan kendali terhadap anggaran daerah dan juga kursi-kursi mereka di Majelis Tinggi. Sentral dari kekuasaan daerah kembali berada di tangan Kremlin. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengembalikan kontrol kekayaan alam pada negara dan membatasi institusi asing yang akan masuk ke Rusia.¹²⁴

Oleh pihak barat tindakan penghapusan pemilu gubernur ini dianggap sebagai tindakan presiden Vladimir Putin yang paling membahayakan sejak ia berkuasa tahun 2000. Namun ia berpendapat bahwa yang dilakukannya adalah untuk menjaga kesatuan dan stabilitas Rusia.

“Tidak ada perubahan pada kehidupan negara. Rusia telah menyatakan pilihannya 10 tahun lalu untuk menjadi negara demokratis, menjalankan pasar bebas serta menjadi negara berorientasi sosial.”¹²⁵

“Bagi Rusia, demokrasi dan stabilitas sama pentingnya. Kami sedang membangun sebuah sistem yang membuat Rusia demokratis dan stabil”¹²⁶

Putin juga akan menghilangkan kursi parlemen untuk kelompok independen.¹²⁷ Tokoh yang duduk di parlemen harus terlebih dulu ditunjuk oleh

¹²³ “Putin: Rusia Akan Tetap Berada di Jalur Demokrasi, *Kompas*”, 25 September 2004. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0409/25/utama/1288234.htm>

¹²⁴ Paul Chaisty, Alex Pravda (ed.), *Majority Control and Executive Dominance, Leading Russia* (Oxford, 2005).

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

partai, tidak boleh lagi ada calon anggota parlemen dari kalangan independen (nonpartai). Saat itu kalangan independen menduduki 50% kursi di Duma (Parlemen Rusia). Dengan dominasi Partai Rusia Bersatu (partai Vladimir Putin) yang menguasai Parlemen baik Majelis Tinggi (Dewan Federasi) dan Majelis Rendah (Duma) yang mencapai 309 dari 450 kursi, maka akan memudahkan presiden Vladimir Putin untuk mendapat dukungan terhadap kebijakan-kebijakannya.¹²⁸ Dengan banyaknya anggota parlemen dari kubunya maka akan mendukung berbagai program dan kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintahan presiden Vladimir Putin dalam usahanya untuk memperbaiki kondisi perekonomian Rusia.

5.1.3. Menempatkan Orang-orang Kepercayaan dalam Pemerintahan.

Salah satu kebijakan Vladimir Putin setelah terpilih sebagai presiden adalah dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi-posisi strategis. Hampir semuanya adalah orang-orang dari St.Peterburg (*Peterburger*) dan bukannya orang-orang Moskow (*Muscovites*). Kebanyakan mereka adalah rekannya sesama mantan perwira KGB (seperti Wakil PM Sergei Ivanov) atau sesama alumnus Universitas St Petersburg (seperti Menteri Perekonomian German Gref dan Wakil Perdana Menteri Dmitri Medvedev).¹²⁹

Di Rusia terdapat tiga faksi yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan presiden Vladimir Putin, yaitu: liberal, teknokrat dan siloviki. Meskipun memiliki pengaruh yang berbeda-beda namun orang-orang yang ada dalam tiga faksi tersebut adalah orang-orang yang memiliki hubungan personal yang dekat dengan presiden Vladimir Putin. Faksi liberal terdiri dari German Gref sebagai Menteri Perkembangan dan Perdagangan, dan Alexei Kudrin sebagai Menteri Keuangan. Faksi ini secara umum terdiri dari para ekonom dan *businessman*. Sedangkan faksi teknokrat terdiri dari Dmitry Medvedev sebagai Deputy Perdana Menteri dan ketua Gazprom, dan Alexei Miller sebagai Presiden Gazprom. Faksi ini mengontrol Gasprom dan monopoli gas negara.¹³⁰

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Martono, *Op. Cit.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Ian Bremmer and Samuel Charap, "The Siloviki in Putin's Russia: Who They Are and What They Want?", *The Washington Quarterly*", Winter, 2006-2007, p. 85.

Di antara ketiganya, Siloviki merupakan faksi yang paling berpengaruh dalam pemerintahan. Siloviki berasal dari kata dalam bahasa Rusia *silovye struktury* yang artinya struktur kekuatan yang merujuk pada angkatan bersenjata, badan pelaksana hukum dan agen rahasia yang memegang kekuasaan koersif negara.¹³¹ Silovik (jamak: siloviki) secara umum lebih dikenal sebagai politisi Rusia yang berasal dari jajaran keamanan, militer, dan eks anggota KGB¹³². Faksi Siloviki terdiri dari Igor Sechin sebagai Wakil Kepala Administrasi Presidensial, Viktor Ivanov sebagai Penasehat Presiden dan Nikolai Patrushev sebagai Direktur FSB.

Siloviki dibawah pimpinan Sechin, Ivanov dan Patrushev bergabung lebih karena persamaan pandangan dan keinginan daripada karena persamaan latar belakang. Karena itu faksi ini dipahami sebagai jaringan informal dari pejabat pemerintahan dan *businessman*. Mereka berbagi pandangan politik yang sama, berdiskusi tentang agenda kebijakan dan bekerja sama untuk mengontrol aset ekonomi negara.

Siloviki dengan pandangan dan keyakinannya ingin membangun Rusia baru yang besar seperti pada jaman Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Berikut upaya-upaya yang dilakukan Siloviki:¹³³

1. Siloviki gencar mengusahakan konsolidasi lanjutan kekuatan politik dan ekonomi dalam sentralisasi negara penuh, keamanan keuangan yang baik dan struktur pertahanan yang kuat. Orang-orang dalam perwakilan-perwakilan tersebut berhak atas status istimewa dalam pemerintahan dan perekonomian untuk mengambil alih tugas pembangunan negara. Hukum, kesejahteraan dan stabilitas merupakan prioritas utama daripada proses demokrasi dan kegiatan sosial masyarakat.
2. Bagi Siloviki negara yang kuat harus menentukan peraturan tegas dalam kehidupan ekonomi negara. Sektor strategis harusnya tidak berada di tangan swasta, produser lokal harus dilindungi dari kekuatan globalisasi dan oligarki harus dihapuskan sebagai sebuah kelas.

¹³¹*Ibid.*, p. 86.

¹³²Lihat lampiran 3.

¹³³Bremmer, *Op. Cit.*, p. 89.

3. Sebagai ekonom nasionalis, Siloviki berpendapat bahwa kekayaan alam negara merupakan milik rakyat Rusia dan atas nama rakyat. Negara pada akhirnya harus mengontrol setiap aspek kekayaannya. Negara juga harus membatasi investasi asing dalam sektor kekayaan alam dan menerapkan royalti yang tinggi atas kerugian dari eksploitasi asing.
4. Siloviki juga mengusahakan restorasi kebesaran Rusia dalam kancan internasional. Bagi mereka, Amerika Serikat dan aliansi NATO masih merupakan ancaman luar. Amerika Serikat dan aliansi NATO dianggap sering mengusik kedaulatan Rusia dan berusaha memanfaatkan kejatuhan Rusia. Siloviki yakin bahwa Rusia harus memperoleh kembali kehormatan dalam kancan internasional seperti pada masa Uni Soviet dengan cara membangun angkatan bersenjata dan militer yang kuat. Mereka juga menuntut negara-negara bekas Uni Soviet untuk bergabung kembali dengan Rusia.
5. Siloviki juga mengesahkan tindakan nasionalistik, xenophobic dan bahkan terkadang cenderung anti-semit. Ini merupakan pandangan paling konservatif dari Gereja Ortodox Rusia. Tindakan rasis yang mengutamakan etnik Slavia terlihat dari pandangan Siloviki terhadap oligarki. Oligarki seperti Aleksei Mordashev dan Vladimir Bogdanov disebut sebagai “oligarki yang baik” karena mereka berdua adalah orang Rusia asli bukan keturunan Yahudi. Bagi Siloviki, “semua orang Yahudi adalah perampok yang berorientasi barat dan akan selalu begitu”.

Siloviki masuk ke jajaran pemerintahan di era pemerintahan presiden Boris Yeltsin dan Vladimir Putin. Ketika ekonomi Rusia direformasi berdasarkan saran IMF, Bank Dunia dan Departemen Keuangan AS kekayaan negara menghilang dan beralih kepemilikannya ke kelompok oligarki dan pihak asing, pada saat itu Siloviki sadar bahwa para oligarki telah menguras kekayaan negara. Di bawah presiden Vladimir Putin, Siloviki membantu menasionalisasikan kembali perusahaan swasta, yang sebelum era presiden Boris Yeltsin adalah

perusahaan negara. Selain itu mereka juga membantu penangkapan atas oligarki-oligarki yang telah banyak merugikan negara.

Pada masa pemerintahan presiden Vladimir Putin, Siloviki mengontrol lebih dari 10 perwakilan pemerintah dan memiliki kewenangan mengontrol beberapa sektor lainnya.¹³⁴ Disamping mengontrol angkatan bersenjata, pelaksanaan hukum dan agen rahasia, para anggota Siloviki juga mengepalai berbagai institusi penting seperti dalam sektor energi dan jasa pabean. Mereka juga memiliki pengaruh dalam Badan Penyimpanan Kekayaan Negara (Federal Property Fund) dan Dinas Pengawasan Keuangan (Financial Monitoring Service). Institusi-institusi tersebut memiliki kekuatan mengatur yang penting dalam perindustrian dan memberi mereka suara yang penting dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.¹³⁵

5.1.4. Menasionalisasi Aset-aset Negara.

Presiden Vladimir Putin dan penasehat ekonominya Andrei Illiarianov pernah mengajukan ke Duma agenda agresif reformasi pajak, deregulasi dan privatisasi tanah pada tahun 2000. Namun setelah itu presiden Vladimir Putin justru mulai kembali ke gaya otoriter ala Uni Soviet. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk paranoid bahwa kekuatan pasar yang tidak terkendali akan melemahkan Rusia seperti yang terjadi pada tahun 1990an.¹³⁶ Perbaikan ekonomi dan stabilitas keamanan dengan cara menasionalisasi kemudian menjadi agenda utama dari kebijakan presiden Vladimir Putin. Ia bersama kabinetnya berusaha memaksimalkan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan negara.

Pada tahun 2003, presiden Vladimir Putin mulai melakukan sebuah strategi ekonomi baru dengan memasukkan kembali banyak aset energi ke dalam kendali Kremlin. Kontrol terhadap usaha strategis di industri minyak, gas dan mineral dilakukan.¹³⁷ Hal ini karena sektor energi merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi Rusia. Perusahaan-perusahaan minyak dan gas semakin dimonopoli dan dikendalikan pemerintah, seperti Gazprom yang

¹³⁴Lihat Samuel Charap, "Siloviki ties to business and government in Russia, *The Washington Quarterly*", October, 2006.

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶Greenspan, *Op. Cit.*, hlm.331.

¹³⁷*Ibid.*

merupakan perusahaan penghasil gas alam terbesar di Rusia dan Rosneft yang bergerak di bidang penghasil minyak.

Dalam pelaksanaan nasionalisasi ini pengusaha-pengusaha yang tidak bekerja sama akan diajukan ke pengadilan dengan berbagai tuduhan sehingga pada akhirnya mau menerima tawaran pemerintah. Pengusaha-pengusaha yang perusahaannya terkena nasionalisasi antara lain: Vladimir Nekasov (CEO Arbat Prestige sebuah perusahaan real estate) yang diajukan ke pengadilan atas tuduhan tidak membayar pajak dan Mikhail Khodorkovsky (pemilik Yukos perusahaan minyak raksasa) yang ditangkap dan dipenjara atas tuduhan penggelapan pajak dan penipuan. Yukos kemudian diambil alih dan bergabung dengan Rosneft. Rosneft bersama Lukoil, Inter RAO dan Gazprom kemudian menjadi perusahaan terbesar di Rusia dan salah satu yang terbesar di dunia.¹³⁸

Cara lain yang dilakukan pemerintah Rusia di bawah presiden Vladimir Putin untuk melancarkan nasionalisasi adalah dengan cara menekan kontraktor asing. Pemerintah membuat aturan konservasi lingkungan yang ketat dan memasang target produksi yang bagi kontraktor tidak mungkin dapat dipenuhi. Jika kontraktor melanggar maka kontrak akan dicabut. Hal ini untuk menekan kontraktor agar mau menjual proyeknya ke perusahaan milik negara. Beberapa proyek yang terkena dampak kebijakan ini adalah: Sakhalin-2 (Shell-Mitsui / Mitsubishi), proyek penjualan gas (Exxonmobil), Kovykta gas field dan east Siberia field (TNK-BP).¹³⁹

Sejak tahun 2001, sekitar 44% dari sektor minyak telah kembali menjadi milik negara. Negara berhasil mengambil alih kembali aset-asetnya senilai 100 miliar USD.¹⁴⁰ Selain menasionalisasi aset-aset yang bergerak di bidang energi pemerintah juga mengambil alih beberapa perusahaan yang bergerak di bidang media. Selain Khodorkovsky, oligarki lain yang juga kehilangan asetnya karena terkena nasionalisasi adalah Gusinsky dan Berezovsky. Pada tahun 2001 dan

¹³⁸Lilik A.M. Agung, "Nasionalisasi Korporasi Asing, *Uni Sosial Demokrat*", 30 Maret, 2008. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10266&coid=4&caid=33&gid=3

¹³⁹Muhammad Fakhur Razi, "*Nasionalisasi Aset Migas: Tinjauan Sejarah*".

¹⁴⁰"Nasionalisme Pembungkus Ekonomi Rusia, *Republika*", 4 Desember 2008. <http://www.republika.co.id>

2002, saluran TV NTV (sebelumnya dimiliki oleh Gusinsky), TV6 dan TVS (sebelumnya dimiliki oleh Berezovsky) telah diambil alih oleh pemerintah.¹⁴¹

Kendali de facto atas aset-aset energi utama yang dilakukan presiden Vladimir Putin bertujuan untuk menghentikan eksploitasi aset-aset tersebut oleh kaum oligarki. Aset-aset itu, akan membawa keuntungan yang besar bagi negara seiring dengan meningkatnya harga minyak dan gas yang terjadi beberapa kali sejak tahun 1998.¹⁴² Dalam jangka pendek, keputusan ini terbukti berhasil.

5.1.5. Reformasi Pajak.

Minimnya pemasukan negara dari sektor pajak dianggap sebagai salah satu penyebab ketidakmampuan Rusia menutup defisit anggaran. Karena tidak adanya pemasukan dapat menjadi ancaman bagi pembenahan ekonomi dan stabilitas politik.¹⁴³ Pada masa pemerintahan presiden Boris Yeltsin banyak terjadi kasus penggelapan pajak dengan cara menyuap aparat pajak. Hal ini terjadi karena para pengusaha beranggapan bahwa menyuap aparat pajak lebih murah daripada membayar pajak.¹⁴⁴

Salah satu faktor dibalik sukses kepemimpinan Vladimir Putin adalah perbaikan disiplin perpajakan, yang tujuan utamanya adalah mencegah penghindaran pembayaran pajak. Dengan menetapkan pajak, pemerintah akan mudah memonitor pendapatan dan pengeluaran dalam sektor sumber daya alam. Penerimaan pajak menyumbang 39% terhadap total penerimaan negara pada tahun 2006, naik dari 34% dibanding tahun 1999.

Pada tahun 2000, pemerintah menyusun UU Pajak baru dengan melakukan terobosan dalam administrasi fiskal di Rusia. Cara ini ditempuh dengan mengurangi beban pajak dan memberlakukan sistem anggaran penghasilan dan pengeluaran yang lebih efisien. UU ini memberikan jaminan perlindungan dan keamanan yang tinggi baik kepada investor domestik maupun investor asing dan juga membantu menarik modal agar masuk ke Rusia. Pajak rata-rata penghasilan

¹⁴¹Katya Malofeeva and Tim Brenton, "Putin's Economy – Eight Year On, *Renaissance Capital*", 2007.

¹⁴²Greenspan, *Op. Cit.*, hlm. 332.

¹⁴³Holmes, 2002.

¹⁴⁴Berliner, 2000.

perorangan sebesar 13%¹⁴⁵ tersebut merupakan yang paling rendah di dunia.¹⁴⁶ Rendahnya pajak tersebut mendorong para pekerja untuk bekerja lebih keras lagi dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya kualitas kerja para pekerja di Rusia maka akan meningkatkan hasil produksi yang juga turut meningkatkan laju perekonomian negara.¹⁴⁷

UU Pajak Baru tersebut dimulai pada tahun 2001, termasuk di dalamnya adalah: pengenalan 13% pajak rata-rata penghasilan perorangan (*flat personal tax*), pergantian berbagai retribusi sosial (*social levies*) dengan menyatukannya dalam pajak sosial (*social tax*) dan penghapusan pajak pergantian (*turnover tax*).¹⁴⁸ Kemudian pada awal tahun 2002 diberlakukan peraturan baru untuk perusahaan yaitu dengan mengurangi pajak maksimal laba perusahaan dari 35% menjadi 24%.¹⁴⁹ Penetapan kebijakan pajak baru ini digunakan pemerintah untuk mendorong investasi lebih luas lagi dalam sektor industri negara.

Pemerintah juga berencana mengurangi beban pajak dalam sektor industri penghasil, namun kebijakan ini tidak berlaku dalam industri bahan baku. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan IMF untuk menetapkan pajak yang lebih tinggi pada sektor energi dan pajak yang lebih rendah pada sektor perindustrian, komersial dan sektor pelayanan. Pada tahun 2003 rancangan UU Reformasi Pajak ini disahkan oleh Duma. UU baru tersebut berisi pembagian monopoli negara terhadap sektor energi. Perusahaan negara mengontrol jaringan listrik dan transmisinya, sedangkan perusahaan swasta diperbolehkan menangani pembangkit listrik dan pendistribusiannya.¹⁵⁰

5.1.6. Memperketat Peraturan dan Membatasi Investasi Asing di Rusia.

Pada tahun 2006, Kementerian Energi dan Industri Rusia mengeluarkan rencana pembatasan investasi asing di Rusia dalam sektor strategis. Sektor strategis tersebut meliputi: teknologi keamanan (*security technology*), produksi persenjataan (*army production*), pembuatan pesawat udara (*aircraft building*),

¹⁴⁵ Lihat lampiran 8.

¹⁴⁶ Malofeeva, *Op. Cit.*

¹⁴⁷ Jon Hellevig, "Russia's Good Fortune: The Flat Tax Reform". www.russianblog.org.

¹⁴⁸ Harry Cohen, "The Russian Economy Under President Putin, *NATO Parliamentary Assembly-Commite Report*", Annual Session, 2003. <http://www.nato-pa.int>

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

antariksa (*space*), energi nuklir (*nuclear energy*), monopoli sumber daya alam (*natural monopolies*) dan cadangan mineral negara (*federal minerals reserves*).¹⁵¹

Investor asing yang berminat terhadap industri tersebut harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah dan akan mendapat jawaban dari proposalnya dalam jangka waktu tiga bulan. Kebijakan ini dijalankan pemerintah Rusia untuk melindungi kepentingan Rusia dan memberikan penjelasan yang transparan kepada investor asing mengenai industri yang akan mereka masuki.¹⁵²

5.2. Hasil Kebijakan Vladimir Putin.

Secara keseluruhan delapan tahun terakhir (2000-2008) merupakan periode kesuksesan ekonomi Rusia. Pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi turun dan pemerintah berhasil membayar banyak hutang luar negeri Rusia.¹⁵³

Berikut keberhasilan-keberhasilan yang dicapai Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin:

5.2.1 Warga Miskin dan Pengangguran Berkurang.

Kebangkrutan yang terjadi pasca runtuhnya Uni Soviet dan krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 menyisakan banyak warga miskin dan pengangguran di Rusia. Pada tahun 1989, hanya 2% dari masyarakat Rusia yang hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 1990an jumlah itu meningkat menjadi 23%. Berdasarkan survey yang dilakukan Bank Dunia, lebih dari 40% masyarakat Rusia hidup dengan kurang dari 4 USD per hari. Dengan kinerja ekonomi yang sangat baik pada masa presiden Vladimir Putin, angka pengangguran yang sebelumnya mencapai 13% pada tahun 1998 turun menjadi 7% pada awal tahun 2007. Pendapatan rata-rata masyarakat meningkat menjadi 540 USD per bulan pada Agustus 2007, dari 65 USD per bulan pada Agustus 1999.¹⁵⁴ Gaji dan pendapatan rata-rata rakyat Rusia meningkat berkali-kali lipat.¹⁵⁵ Dengan gaji yang memadai

¹⁵¹Irna Gustia, "Rusia Akan Batasi Investasi Asing, *detiksport*", 14 Oktober, 2006.

¹⁵²Lihat lampiran 5.

¹⁵³Malofeeva, *Op. Cit.*

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵AS Business Week, 7 December 2006.

rakyat mulai konsumtif. Hal ini terlihat dari meningkatnya konsumen kredit antara tahun 2000-2006 yang meningkat 45 kali lipat.¹⁵⁶

Rusia juga berhasil meningkatkan jumlah warga kelas menengah menjadi kira-kira 37% dari jumlah total penduduk yaitu dari 8 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 55 juta pada tahun 2005. Selain berhasil mengurangi warga miskin dan meningkatkan warga kelas menengah, pemerintah juga berhasil mengurangi angka pengangguran di Rusia. Pada tahun 1999 terdapat 8,6 juta pengangguran di Rusia dengan tingkat pengangguran 13,2%. Pada tahun 2006 jumlah ini turun menjadi 5 juta dengan tingkat penurunan 8%. Angka ini terus menurun seiring dengan semakin membaiknya perekonomian dan perindustrian sehingga lapangan pekerjaan banyak tersedia.¹⁵⁷

5.2.2. Inflasi Turun.

Liberalisasi yang terlalu cepat di Rusia menyebabkan inflasi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan berhenti berproduksi akibat terkena privatisasi sedangkan perusahaan-perusahaan baru yang belum dapat beroperasi. Sehingga pergerakan perekonomian ikut terhenti dan mengakibatkan inflasi.

Tingkat inflasi Rusia pada tahun 1998 mencapai 80% saat pemerintah gagal menahan kenaikan harga-harga. Pada tahun 1999 saat Vladimir Putin mulai mengambil peran dalam pemerintahan, inflasi di Rusia turun menjadi 36%. Saat kondisi di Rusia makin stabil dan perekonomian membaik, antara tahun 2000 sampai 2007 inflasi terus mengalami penurunan tiap tahunnya.¹⁵⁸ Pada tahun 2007, inflasi Rusia hanya mencapai sekitar 9%.¹⁵⁹

5.2.3. PDB (Produk Domestik Bruto) dan Migas (Minyak dan Gas) Meningkat.

PDB (Produk Domestik Bruto) di Rusia setelah tahun 1989 mengalami penurunan tiap tahunnya. Jatuhnya PDB yang dialami pada masa itu lebih besar daripada yang pernah dialami pada masa Perang Dunia II. Pada tahun 1940-1946

¹⁵⁶Lihat *Yezgodno ob'em potrebitel'skogo kreditovannaya v rossii udvaivaetsya*.

¹⁵⁷Malofeeva, *Op. Cit.*

¹⁵⁸"Russia's Economy Under Vladimir Putin: achievements and failures, *RIA Novosti*", , March, 2008. <http://www.cdi.org/russia/johnson/2008-45-27.cfm>

¹⁵⁹Lihat lampiran 2.

produksi industri Uni Soviet turun sebesar 24% sedangkan pada tahun 1990-1999, produksi industri Rusia turun hampir 60%.¹⁶⁰ Namun pada tahun 2007 PDB Rusia mencapai 1,3 miliar USD atau 6 kali lebih besar daripada yang dicapai pada tahun 1999. Ini membuat peringkat Rusia naik dari urutan 22 ke urutan 11 di dunia sebagai negara dengan PDB tinggi.

Tiap tahun perdagangan Rusia pada masa pemerintahan presiden Vladimir Putin memperoleh surplus rata-rata 7% per tahun (2000: 10%, 2001: 5.7%, 2002: 4.9%, 2003: 7.3%, 2004: 7.1%, 2005: 6.5%, 2006: 6.7%, 2007: 8,1%).¹⁶¹ Angka tersebut menjadikan Rusia sebagai negara di urutan 7 dunia terbesar dalam hal kekuatan daya beli. Investasi dalam sektor industri yang juga menopang PDB juga meningkat dari 75% menjadi 125%, begitu pula dengan produksi agrikultural dan konstruksi.¹⁶²

Kebijakan dalam bidang minyak dan gas yang dilakukan Vladimir Putin terbukti berhasil. Perbaikan yang ia lakukan pada infrastruktur ekonomi berhasil meningkatkan produksi minyak dan gas. Rusia memiliki 1/8 cadangan uranium dunia, 1/3 gas alam dunia dan 1/5 cadangan minyak dunia.¹⁶³ Hal ini menjadikan Rusia sebagai pengeksport minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi dan produsen gas alam nomor satu di dunia. Rusia mampu menghasilkan minyak 9,5 juta barrel per hari dan ekspor minyak per hari sekitar 7 juta barrel (2006) sehingga profit dari minyak yang berhasil diperoleh sangat besar. Selain sektor minyak, sektor gas juga memberi sumbangan pendapatan yang besar. Pada tahun 2006, volume ekspor gas alam 141 miliar meter kubik per hari dengan demikian pendapatan negara dari sektor ini sekitar 674 miliar USD pada tahun 2006.¹⁶⁴

Dengan demikian sektor Migas adalah penyumbang terbesar bagi pertumbuhan PDB di Rusia. Sektor ini memberi kontribusi sebesar 5,7% dari rata-rata 6-7% pertumbuhan PDB per tahun. IMF dan Bank Dunia memperkirakan

¹⁶⁰ Stiglitz, *Op. Cit.*, hlm.201.

¹⁶¹ Lihat lampiran 2.

¹⁶² "Russia's Economy Under Vladimir Putin: achievements and failures, *RIA Novosti*", March, 2008. <http://www.cdi.org/russia/johnson/2008-45-27.cfm>

¹⁶³ Hal ini dijadikan presiden Vladimir Putin sebagai *Oil Weapon*. Ia tahu bahwa Uni Eropa sangat bergantung pada minyak Rusia, maka pihak Moskow tidak akan segan-segan memutus suplai minyak apabila keamanannya terancam seperti saat Ukraina, Georgia dan Belarusia mulai condong ke pihak barat. Penyerahan hak monopoli gas Khazakstan juga menambah kekuatan Rusia.

¹⁶⁴ Koran bisnis Inggris *The Financial Times* edisi Agustus 2006, menulis bahwa produksi minyak mentah Rusia 9,2 juta barel/hari, sudah lebih tinggi 46.000 barel dibanding Arab Saudi.

pertumbuhan PDB Rusia setidaknya 7% pada tahun 2007. Rusia mengalami peningkatan pesat devisa negara karena kenaikan harga minyak dan gas pada tahun 2004. Harga minyak yang berada pada kisaran 20 USD per barrel bahkan sempat melejit ke angka di atas 50 USD per barrel dan bertahan cukup lama di angka itu membuat penerimaan devisa Rusia menjadi berlipat-lipat. Inilah salah satu bukti bahwa harga minyak sangat berarti bagi perekonomian Rusia.

5.2.4. Investasi Asing di Rusia Meningkat.

Bersamaan dengan semakin membaiknya perekonomian di Rusia, kepercayaan pihak asing untuk berinvestasi dan memasarkan produknya di negara tersebut juga ikut meningkat.¹⁶⁵ Pada tahun 1999, investasi asing di Rusia meningkat 4,5% dan merupakan peningkatan pertama sejak tahun 1990. Investasi asing terus meningkat dari batas terendahnya hingga hampir mencapai 30% pada tahun 2001. Pada periode Januari-Maret 2007 Rusia menerima 24,6 miliar USD dari investasi asing. Total investasi asing di Rusia pada tahun 2007 mencapai 151,5 miliar USD. Dengan rincian: investasi kredit pinjaman (50%), investasi langsung (48,2%) dan investasi portofolio (1,8%).¹⁶⁶

Investasi asing di Rusia yang terutama adalah yang bergerak dalam bidang transportasi, produksi mineral dan energi. Salah satu investasi asing terbesar di Rusia dalam bidang ini adalah investasi dari Jepang. Jepang berinvestasi dalam proyek jalur kereta cepat di Moskow dan pembangkit energi nuklir yang merupakan kerja sama antara Atomenergoprom (perusahaan energi nuklir negara) dengan Toshiba Jepang.¹⁶⁷ Selain itu, Jepang juga telah berinvestasi dalam proyek Sakhalin-2 dengan menginvestasikan dana sebesar 8 miliar USD. Pembagian dalam proyek ini yaitu 50% oleh Gazprom Sakhalin Holding, 27.5% oleh Shell Sakhalin Holdings dan 12.5% oleh Diamond Gas Sakhalin yang dikontrol oleh Mitsubishi Corporation.¹⁶⁸ Selain dengan Jepang, Rusia juga berencana bekerja sama dengan Cina untuk proyek jalur pipa minyak. Jalur pipa

¹⁶⁵ Lihat lampiran 1.

¹⁶⁶ "Accrued Foreign Investment in Russia Up 33% to \$ 152 bln in Q1, *Ria Novosti*", May 21, 2007. <http://en.rian.ru/russia/20070521/65809363.html>

¹⁶⁷ Sergay Blagov, "Russia Struggles To Encourage Japanese Investment, *Eurasia Daily Monitor*", Volume 5, April 29, 2008. [http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews\[tt_news\]=33588](http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=33588)

¹⁶⁸ *Ibid.*

minyak yang akan dibuat ini direncanakan akan menyalurkan minyak untuk kawasan Asia Pasifik lewat Cina.

Investasi lain yang juga banyak terdapat di Rusia adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang: makanan (Cadbury, Mars dan Stollwerck), minuman (Baltika, Brewery, Efes Brewery dan Heineken), rokok (Phillip Morris), telekomunikasi (Cyprus Mustcom Consorsium yang berinvestasi di Suyazinvest dan Deutche Telecom yang berinvestasi di MTS, keduanya adalah perusahaan telekomunikasi Rusia), elektronik (Korea Selatan: Samsung dan LG, Jepang: Sony, Toshiba dan Fuji) dan otomotif (Ford, Volvo, Renault, Toyota dan General Motor yang bekerja sama dengan Auto VAZ).

Industri otomotif Jerman merupakan salah satu investor terbesar di Rusia. Berkat kenaikan gaji yang diberlakukan pemerintah Rusia, daya beli konsumen Rusia meningkat drastis. Rusia kini menjadi sasaran pemasaran dan investasi yang paling disukai, demikian dikemukakan banyak pengusaha Jerman. Klaus Mangold dari Komisi Hubungan Perekonomian Eropa Timur dan Jerman, sebuah perhimpunan pengusaha Jerman yang menanam modal di kawasan Eropa timur mengatakan bahwa investor Jerman punya tiga pangsa pasar besar dalam agendanya, yaitu India, Cina dan Rusia. Di antara ketiga negara itu, Rusia memiliki posisi paling atas karena Rusia memiliki bahan mentah dan sumber energi yang cukup banyak dan hal itu yang tidak dimiliki oleh Cina dan India.¹⁶⁹

Selain itu bank asing seperti Citibank meningkatkan jumlah cabangnya menjadi dua kali lipat pada tahun 2007 dan mencatat pertumbuhan bisnis hingga 70% pada tahun yang sama. Sebuah supermarket waralaba terkenal asal Swedia bernama Ikea menjadi salah satu supermarket terbesar di Rusia dengan banyak cabang dan omzet yang tinggi.¹⁷⁰ Banyaknya bisnis asing di Rusia ini dipicu oleh meningkatnya gaji warga Rusia dengan demikian konsumsi warga juga ikut meningkat.

¹⁶⁹Investasi Jerman di Eropa Timur, 17 Juni 2008. <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3491704,00.html>.

¹⁷⁰Christopher Kenneth, "Retail Grows on back of Moscow Boom, *The Russia Journal*", Sept 06, 2002.

5.2.5. Investasi Rusia ke Luar Negeri Meningkat.

Selain mengalami peningkatan investasi asing di dalam negeri, membaiknya kondisi perekonomian juga meningkatkan investasi Rusia ke luar negeri. Pada tahun 2007, investasi Rusia ke luar negeri meningkat 16,6% menjadi 11,776 miliar USD. Investasi tersebut meliputi: investasi langsung (6,245 miliar USD), investasi portofolio (795 juta USD) dan investasi lainnya (5,741 miliar USD).¹⁷¹

Sebagian besar investasi Rusia adalah ke negara-negara anggota CIS (Commonwealth of Independent States)¹⁷². Investasi Rusia kebanyakan dalam sektor strategis hasil alam seperti minyak, gas dan energi lainnya. Investasi dalam sektor gas berupa jalur pipa gas yang mengalirkan gas ke negara-negara di kawasan Eropa. Rusia juga berinvestasi di perusahaan listrik dan telekomunikasi di negara-negara tersebut. Menurut catatan UNCTAD tahun 2005, Ukraina merupakan sasaran investasi terbesar Rusia diantara negara-negara CIS lainnya. Namun menurut catatan dari Goskomstat tahun 2005 negara CIS tujuan investasi terbesar Rusia adalah Belarusia, Ukraina, Kazakhstan dan Uzbekistan. Perusahaan-perusahaan energi Rusia yang berinvestasi di negara CIS antara lain Gazprom, RAO UES dan LUKoil.¹⁷³

Di Georgia, pada tahun 2004 RAO UES tercatat memiliki saham di beberapa perusahaan energi negara tersebut. RAO UES memiliki 75% saham di AES Telasi, 50% di AES Transenergy, selain itu RAO UES juga mengontrol 20% daya pembangkit listrik dan 30% suplai listrik untuk konsumsi domestik di Georgia. Di Armenia, RAO UES mengelola beberapa perusahaan energi seperti Razdanskaya TPP dan Armenian NPP, di Moldova mengontrol Maldovskaya TPP, di Belarusia mengelola sebuah perusahaan penyuplai listrik untuk Polandia bernama Berezsovskaya TPP dan di Kazakhstan RAO UES menjalankan beberapa proyek penyuplaian dan transitor listrik. Di Ukraina, LUKoil, TNK-BP dan Tatneft mengontrol lebih dari 80% perdagangan petroleum negara. Selain itu

¹⁷¹Lihat *Federal Statistic Service / Rosstat*.

¹⁷²Negara anggota CIS: Rusia, Azerbaijan, Armenia, Belarusia, Georgia, Kazakshtan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan dan Ukraina. Antara tahun 2003 dan 2005 tiga negara anggota CIS yaitu Georgia, Ukraina dan Kirgizstan memisahkan diri.

¹⁷³Peeter Vahtra, "Russian Investment in the CIS-Scope, Motivations Leverage, *Electronic Publication of Pan-European Institute*", September, 2005. <http://www.tukkk.fi/pei/pub>

LUKoil juga berinvestasi di Kazakhstan yang terkenal sebagai negara CIS penghasil minyak terbesar.¹⁷⁴

Perusahaan-perusahaan Rusia juga menguasai telekomunikasi di sektor servis provider negara-negara CIS. VimpelCom yang merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Rusia berinvestasi di Kar-Tel (Kazakhstan) dan memiliki 40% saham di KyivStar (Ukraina). Perusahaan telekomunikasi Rusia lainnya adalah MTS yang merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Rusia memiliki saham mayoritas di UMC (Ukraine Mobile Communication), 75% saham di Uzdunorbital (Uzbekistan) dan 49% di MTS Belarusia.¹⁷⁵

Selain ke negara-negara anggota CIS, sebagian besar investasi Rusia adalah ke negara-negara di kawasan Eropa walaupun ada juga yang dialokasikan ke negara-negara yang bukan di kawasan Eropa seperti ke Amerika Serikat (609 juta USD) dan ke Bahama (1,145 miliar USD). Negara-negara yang paling banyak menjadi sasaran investasi Rusia antara lain sebagai berikut: Siprus (2,091 miliar USD), Austria (1,526 miliar USD), Inggris (1,311 miliar USD), Luksemburg (1,016 miliar USD), Belanda (859 juta USD), Ukraina (814 juta USD), Jerman (372 juta USD) dan Lithuania (288 juta USD).¹⁷⁶ Investasi-investasi tersebut berupa investasi dalam sektor energi seperti pertambangan migas dan hasil tambang lainnya, jalur pipa minyak dan gas, peralatan dan teknologi militer, serta investasi di bidang properti.

Rusia juga mulai berinvestasi ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja dan Thailand. Rusia yang diwakili perusahaan energi raksasanya Gazprom telah menandatangani perjanjian dengan PTT sebuah perusahaan minyak dan gas Thailand. Gazprom juga bernegosiasi dengan Petronas Malaysia untuk berinvestasi dalam pembangunan pipa gas ASEAN dan untuk menyuplai infrastruktur gas pada negara-negara anggota ASEAN. Selain itu Silovye Mashiny sebuah produser peralatan mesin Rusia akan membantu pembangunan dan modernisasi tanaman dengan teknologi arus panas dan tenaga hidro di Thailand, Laos, Vietnam dan Kamboja. Rusia juga akan mengirimkan teknisi dan

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

membangun pusat pemeliharaan teknis pesawat dan helikopter di Malaysia dan Indonesia. Bahkan Rusia akan ikut berpartisipasi dalam pengembangan tenaga nuklir di beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam.¹⁷⁷

Salah satu negara di ASEAN yang menjadi prioritas sasaran investasi Rusia adalah Indonesia karena Indonesia memiliki banyak sumber pertambangan seperti Rusia. Pada kunjungan presiden Vladimir Putin 6 September 2007, disepakati bahwa Rusia akan berinvestasi sebesar 4 miliar USD dalam bidang pertambangan seperti bauksit, aluminium, minyak dan gas. Kerja sama tersebut terjadi antara Pertamina dengan LukOil yang akan mengeksplorasi empat blok laut dalam yaitu di Blok Banyu, Kalimantan Timur dan Klamono-Papua. Kerja sama lain yaitu antara PT. Aneka Tambang dengan United Company Rus-AL dalam pengembangan bauksit menjadi aluminium, selain itu Rusia juga berinvestasi di sektor perikanan dan pariwisata. Sektor perikanan dipusatkan di Indonesia Timur seperti Ambon dan Maluku, sedangkan sektor pariwisata di Bali dan Manado. Total investasi Rusia ke Indonesia pada tahun 2007 mencapai 20-30 juta USD.¹⁷⁸

5.2.6. Eksport-Import Meningkat.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik yang kian stabil di Rusia juga membawa dampak positif dalam eksport-import negara tersebut.¹⁷⁹ Kerja sama eksport import yang sempat menurun selama terjadinya krisis ekonomi mulai meningkat. Meningkatnya eksport-import ini juga merupakan salah satu faktor makin membaiknya perekonomian Rusia. Sektor eksport-import memberi sumbangan yang cukup besar bagi cadangan devisa negara.

Komoditi terbesar dari eksport Rusia adalah dari sektor bahan mentah dan hasil alam seperti migas, metalurgi dan kimia.¹⁸⁰ Penyaluran migas ke kawasan Eropa melalui jalur pipa merupakan eksport paling menguntungkan Rusia, karena

¹⁷⁷“Russia and Southeast Asia: Commitment to Cooperation, *Ria Novosti*”, May 23, 2007. <http://en.rian.ru/analysis/20070523/65962179.html>

¹⁷⁸www.suarapembaruan.com/news/2007/09/07/index.html

¹⁷⁹ Lihat lampiran 1.

¹⁸⁰“Russia’s Economy Under Vladimir Putin: achievements and failures, *RIA Novosti*”, March, 2008. <http://www.cdi.org/russia/johnson/2008-45-27.cfm>

kawasan-kawasan tersebut sangat bergantung pada pasokan migas Rusia. Pedapatan dari ekspor sektor bahan bakar dan energi yang termasuk didalamnya bea cukai dan pajak kemudian dialokasikan kedalam anggaran belanja negara. Pada tahun 2007, ekspor dari sektor ini mencapai 8.7% dari total PDB negara walaupun tidak sebesar seperti pada tahun 2000 yang mencapai 20% saat harga komoditas tersebut mencapai nilai tertingginya.¹⁸¹ Ekspor dalam sektor migas merupakan sektor paling strategis karena Rusia merupakan pemasok migas utama untuk negara-negara di kawasan Eropa khususnya Eropa Timur dan Tengah.

Selain dari sektor ekspor, sektor lain yang juga memberi sumbangan bagi devisa negara adalah sektor import. Hal ini disebabkan barang-barang yang masuk ke Rusia akan terkena bea cukai dan pajak. Komoditas import Rusia antara lain produk beku dari unggas, daging babi, kuda dan produk daging merah (sapi, lembu, domba dan kambing) yang diimport dari negara ketiga dengan terlebih dahulu mengalami pemrosesan dan pengemasan di Amerika Serikat. Makanan bayi dan produk dari sapi seperti susu, keju, mayones dan mentega diimport dari Australia dan Selandia Baru. Rusia juga mengimport obat-obatan dari Amerika Serikat, Inggris dan Jerman.¹⁸² Minyak kelapa sawit (CPO), kopi, teh, tembakau, kakao dan rempah-rempah diimport dari Indonesia¹⁸³. Selain mengimport bahan makanan dan obat-obatan, Rusia juga mengimport barang-barang seperti furnitur, kerajinan tangan, garmen dan tekstil dari negara-negara di kawasan Asia seperti Cina, India, Indonesia, Malaysia dan Thailand.¹⁸⁴

5.2.7. Bisnis Properti Meningkat.

Kondisi perekonomian dan sosial dalam negeri yang makin stabil membuat bisnis properti di Rusia pun mengalami peningkatan. Walaupun hanya terbatas di kota-kota besar saja namun hal ini merupakan indikasi yang baik. Real

¹⁸¹Lihat *Rosstat Confirm Record GDP Growth Kommersand*.

¹⁸² <http://www.custom.ru/en/travelers/cofgpp/htm>.

¹⁸³ Pada tahun 2007 Rusia melangsungkan kerja sama ekspor-import dengan Indonesia yang mencapai 1 miliar USD. Dalam ekspor-import ini, Indonesia diwakili oleh Bank Mandiri. Bank Mandiri telah menandatangani perjanjian dengan bank-bank Rusia yaitu: Vnesheconombank, Vneshtorgbank, Russian Export Import Bank dan Alfa Bank. (Kerja Sama Dengan Bank Swasta Terbesar di Rusia. 6 September 2007. <http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/news-detail.asp?id=HIJL49393311&row=9>)

¹⁸⁴ "Saatnya Peningkatan Dagang Indonesia-Rusia, *Antara*", 6 September, 2007. <http://www.antara.co.id/arc/2007/9/6/saatnya-peningkatan-dagang-indonesia-rusia/htm>.

estate Moskow di lokasi-lokasi terbaik beberapa tahun terakhir meningkat tajam dengan harga yang naik berlipat-lipat ganda dan tidak menunjukkan akan mengalami penurunan.

Harga properti Moskow sekarang sangat tinggi dibandingkan 10 tahun yang lalu. Saat itu harga untuk sebuah flat berkualitas sekitar 8000 USD namun sekarang harganya naik 100% dan bahkan lebih. Diperkirakan real estate Rusia akan meningkat sekitar 2,7 miliar USD pada tahun 2006. Pada tahun 2007 real estate Moskow pada properti komersial meningkat 30% dan 60% -100% pada retail premis untuk lokasi-lokasi terbaik.¹⁸⁵

Berikut beberapa alasan mengapa harga properti Rusia terutama di Moskow mengalami peningkatan:¹⁸⁶

1. Pembukaan ekonomi dan perdagangan Rusia yang menyebabkan masuknya investor-investor asing.

Banyaknya perusahaan-perusahaan asing di Rusia tentunya diikuti dengan banyaknya orang-orang asing yang masuk ke Rusia dan bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Banyaknya pekerja dan staf asing tersebut menuntut tersedianya kantor dan residence yang berkualitas tinggi hal ini menyebabkan terjadinya ledakan harga real estate.

2. Kenaikan harga minyak dan gas.

Naiknya harga minyak dan gas serta meningkatnya permintaan terhadap dua komoditi utama Rusia tersebut yang memberikan keuntungan bagi negara. Negara kemudian menginvestasikan uang tersebut dalam sektor real estate dan pengembangan kota.

3. Masuknya ekonomi kapitalis.

Pengaruh dari masuknya ekonomi kapitalis di Rusia salah satunya adalah terciptanya kelas menengah baru. Beberapa tahun terakhir warga kelas menengah di Rusia terus bertambah. Orang-orang tersebut menginginkan tempat tinggal yang lebih baik. Hal ini mendorong banyaknya pembangunan dan pengembangan hunian baru di kota.

¹⁸⁵Kelly Price, "Moskow Real Estate-Investing For Huge Capital Growth, *Article Snach*".
<http://www.articleonramp.com/Article.cfm?ID=5545>

¹⁸⁶*Ibid.*

4. Hipotek.

Hingga beberapa tahun lalu hipotek bukanlah hal yang umum dalam pasar real estate Rusia. Namun harus diakui ini merupakan hal baru yang mengubah pasar real estate. Dengan demikian pemilik dapat menggadaikan tempat tinggalnya kepada bank. Kemudian selama masa pinjaman berjalan, tempat tinggal tersebut akan disewakan kepada orang lain. Tentang hipotek ini terdapat dalam pidato tahunan presiden Vladimir kepada Majelis Federal Federasi Rusia.¹⁸⁷

Meningkatnya properti di Rusia turut menarik perhatian dari perusahaan real estate asing. Banyak investor asing yang ingin berinvestasi di Rusia, salah satu investor asing ternama yang berinvestasi di Rusia adalah divisi real estate dari *Bank Deutsche* Jerman. Bank tersebut akan menginvestasikan dana sebesar 500 juta USD untuk pengembangan real estate di Rusia.¹⁸⁸ Sedangkan investasi real estate terbesar adalah *Limitless* sebuah divisi real estate dari *Dubai World* milik keluarga pangeran dari Dubai. Perusahaan ini sedang menjalankan proyek *Great Domodedovo* yang dibangun tidak jauh dari Moskow. Seluas 44.000 hektar lahan digunakan untuk pembangunan residence, gedung-gedung komersial baru dan pusat rekreasi. Proyek ini menghabiskan dana sebesar 11 miliar USD.¹⁸⁹

Investasi properti di Rusia tidak hanya datang dari investor asing saja tetapi juga dari investor dalam negeri. Pemerintah kota Moskow sedang merencanakan sebuah proyek besar untuk kota tersebut yaitu dengan membangun sebuah menara yang dinamakan *Moscow City Tower*. Menara ini dirancang oleh seorang arsitektur terkenal asal Inggris yaitu Sir Norman Foster pemenang *Pritzker Prize* yang merupakan penghargaan bagi arsitektur-arsitektur terbaik dunia. Menara ini diharapkan akan menjadi bangunan tertinggi di Eropa saat selesai nanti.¹⁹⁰

Selain berinvestasi di dalam negeri, para miliader Rusia juga banyak yang berinvestasi di luar negeri. Negara tujuan utama para miliader ini untuk membeli real estate adalah di Perancis, Siprus, Spanyol dan Inggris. Di Perancis, banyak

¹⁸⁷ Lihat lampiran 7.

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

orang Rusia yang membeli real estate di French Riviera yang terkenal indah dan merupakan kawasan elit dengan harga real estate yang tinggi. Di Siprus banyak orang Rusia yang memiliki rumah peristirahatan di pulau-pulau yang terdapat disana. Kota di Inggris yang paling diminati adalah London. Lokasi-lokasi seperti di Kensington, Chelsea, Knightsbridge, Pimlico adalah lokasi favorit di London. Di daerah lain yang juga diminati adalah pedesaan dekat Guildford, Cobham dan sekitar Wentworth dan Sunningdale. Di Berkshire terdapat tempat-tempat terkenal seperti Marlow dan Beaconsfield.¹⁹¹

5.2.8. Cadangan Devisa Bertambah.

Kenaikan harga migas, PDB, investasi, properti dan ekspor-import Rusia memberikan sumbangan yang besar tidak hanya bagi pertumbuhan perekonomian dan stabilitas negara namun juga dalam bertambahnya cadangan devisa negara. Dana-dana yang didapat dari sektor-sektor tersebut telah meningkatkan cadangan devisa negara menjadi berkali-kali lipat. Bahkan Rusia juga memiliki dana stabilisasi sebesar lebih dari 80 miliar USD.¹⁹²

Cadangan devisa Rusia naik dari 12 miliar USD pada akhir tahun 1999 menjadi berkali-kali lipat hanya dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun. Cadangan devisa pun terus meningkat tiap tahun hingga 300 miliar USD pada tahun 2006. Bahkan pada tahun 2007, cadangan devisa Rusia sudah lebih dari 400 miliar USD.¹⁹³ Jumlah tersebut merupakan cadangan devisa negara nomor tiga terbesar di dunia setelah Cina dan Jepang.

5.2.9. Pelunasan Hutang Luar Negeri.

Keruntuhan Uni Soviet bukan hanya mewariskan banyak masalah tetapi juga hutang luar negeri yang sangat besar. Setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, Rusia mewarisi hutang luar negeri Uni Soviet sebesar 70 miliar USD. Hutang tersebut masih ditambah dengan hutang Rusia kepada IMF. Pinjaman pertama itu

¹⁹¹ "Russian Investors Putting Their Money Into International Property, *Property Wire*", October 8, 2008. <http://www.propertywire.com/news/europe/russian-investors-international-property-200810081803.html>

¹⁹² "Belajar dari Rusia Melunasi Hutang, *Riau Pos*", 28 Agt, 2006. <http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Belajar-dari-Rusia-Melunasi-Utang.htm>.

¹⁹³ Lihat lampiran 2.

diberikan pada 1992 dan yang kedua pada 1999 karena pada tahun 1998 Rusia terkena krisis yang terkenal dengan Krisis Ekonomi 1998 sebagai dampak negatif krisis moneter yang terjadi di Asia Timur dan Tenggara.

Pada periode tahun 2005-2006, Rusia sudah berhasil membayar beberapa hutang luar negerinya. Pada Mei 2005, Rusia telah membayar 15 miliar USD hutang luar negeri ke kreditornya. Pembayaran awal ini membuat Rusia menghemat total beban hutang luar negeri sebesar 12 miliar USD. Sebelumnya pada Februari 2005 Rusia juga telah berhasil membayar hutang luar negerinya pada IMF. Jumlah hutang terakhir pada IMF yang dibayar sebesar 4,3 miliar USD. Pembayaran ini dilakukan tiga tahun lebih awal dari jatuh tempo yang ditetapkan IMF.¹⁹⁴

Kemudian pada musim panas Juni 2006, bank milik Pemerintah Rusia bernama *Vneshekonombank* telah mengirim uang sebesar 23,7 miliar USD. Pembayaran itu dilakukan dalam waktu empat hari dengan menukar uang USD ke dalam sembilan jenis mata uang. Di antara dana yang ditransfer *Vneshekonombank* itu, sudah termasuk pula denda sebesar kurang lebih 1 miliar USD karena Rusia melakukan pembayaran hutang terlalu dini. Meskipun harus membayar denda namun Rusia berhasil menyelamatkan beban biaya pembayaran bunga hutang luar negeri sebesar 7,7 miliar USD pada Paris Club. Penghematan itu kemudian dicadangkan ke pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur.

Hingga tahun 2008 Rusia hanya memiliki hutang luar negeri sebesar 1,1 miliar USD ke beberapa bank komersial Rusia dan 3,5 miliar USD ke Paris Club, sebuah kelompok kreditor internasional informal yang terdiri atas 19 negara termasuk Rusia di dalamnya sebagai anggota.¹⁹⁵ Salah satu penyebab masih adanya hutang luar negeri Rusia adalah penolakan beberapa negara kreditor tentang usulan Rusia untuk melunasi hutangnya lebih cepat. Karena pembayaran awal tersebut akan membuat mereka kehilangan pendapatan yang bersumber dari bunga pinjaman.

¹⁹⁴ "Rusia Bayar Utang ke IMF, *Kompas*", 2 Februari, 2005. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0502/02/ln/1537846.htm>.

¹⁹⁵ "Hampir Semua Utang Terbayar, *Kompas*", 24 Agustus, 2006. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0608/24/ln/2901414.htm>.

Kebijakan-kebijakan yang dijalankan presiden Vladimir Putin tersebut jika dilihat dari Teori Perubahan Politik menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat akan kinerja rezim sebelumnya. Karena ketidakpuasan terhadap suatu sistem politik atau pemerintahan dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan semangat untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang puas dengan hasil dari kebijakan yang dijalankan oleh suatu rezim akan mendorong rezim yang berikutnya untuk mempertahankan dan melanjutkan kebijakan tersebut. Kalaupun terjadi perubahan bukan lah suatu perubahan yang drastis. Tetapi yang terjadi di Rusia pada masa pemerintahan Vladimir Putin tidak demikian. Banyak perubahan dan reformasi terhadap kebijakan lama yang ia lakukan. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan terhadap pemerintahan presiden Boris Yeltsin yang sebelumnya memimpin.

Berdasarkan teori ini pula diketahui bahwa tindakan yang dilakukan presiden Vladimir Putin berhasil. Keberhasilan ini dapat dilihat dari dipilihnya ia kembali untuk menjadi presiden pada periode kedua. Sesuai dengan teori ini yang menyatakan jika usaha-usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil maka kelompok yang bersangkutan akan membubarkan diri. Sedangkan bila berhasil maka akan dapat terus mempertahankan bahkan menciptakan tujuan-tujuan baru. Hal inilah yang terlihat pada periode kedua kepemimpinan presiden Vladimir Putin. Pada periode kedua kepemimpinannya, selain terus melanjutkan kebijakan yang sudah dijalankan, ia juga melakukan kebijakan-kebijakan baru.

Sedangkan Kunci keberhasilan dari pemerintahan presiden Vladimir Putin jika dilihat dari teori *Contingency Model of Leadership* adalah karena adanya sinergi yang pas antara gaya kepemimpinannya yang cenderung sentralistik dengan karakteristik dari bangsa Rusia yang majemuk dan kondisi negara pada saat itu. Saat ia terpilih sebagai presiden, kondisi Rusia dalam keadaan kacau. Perekonomiannya hancur karena banyak perusahaan negara yang diambil alih pihak swasta sehingga kendali atas sumber daya alam menjadi tidak termonitor dengan baik. Hal ini memberi peluang para oligarki dan investor asing untuk menguras sumber daya alam Rusia dan membawa pergi kekayaan tersebut ke luar negeri. Adanya otonomi-otonomi menyebabkan kekuatan daerah menguat dan

negara juga kian melemah karena muncul banyak gerakan separatis yang ingin memisahkan diri sehingga kesatuan bangsa menjadi terancam.

Pemerintahnya yang cenderung keras, tegas dan tidak kenal kompromi yang sering dinilai otoriter ternyata justru berhasil membawa dampak positif bagi perekonomian Rusia. Dari sini terlihat bahwa kesuksesan suatu pemerintahan tidak tergantung pada patron bahwa seorang pemimpin harus demokratis atau harus otoriter. Namun kesuksesan suatu pemerintahan tergantung dari adanya kesesuaian antara gaya kepemimpinan dengan kondisi masyarakat di negara tersebut. Dalam hal ini Rusia ternyata lebih cocok dengan gaya kepemimpinan presiden Vladimir Putin yang keras, tegas dan tidak kenal kompromi.

